

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DENPASAR 2016



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DENPASAR 2016



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DENPASAR 2016

ISBN: 978-602-6395-14-6

Nomor Publikasi: 51710.1715

Katalog: 4102004.5171

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xiv +58 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Infografis:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Dicetak oleh:

Percetakan Arysta Jaya, Denpasar

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun Naskah :

Penanggung Jawab Umum : I Gede Suarta

Penanggung Jawab Teknis : I Gede Antara Putra

Koordinator : I Gede Antara Putra

**Penyunting : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Kota Denpasar**

<https://denpasarkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR



Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016 merupakan publikasi perdana Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Denpasar antar waktu dan perbandingannya baik antar kecamatan maupun kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan bersumber dari BPS, dan Dinas terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan masukan selalu diundang dan dihormati dalam rangka penyempurnaan terbitan yang akan datang, sambil terus mengembangkan diskursus yang berkualitas, mengawal pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Denpasar, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Denpasar



I Gede Suarta

DAFTAR ISI

1. KEPENDUDUKAN	1
2. KESEHATAN GIZI	15
3. PENDIDIKAN	23
4. KETENAGAKERJAAN	32
5. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	35
6. KEMISKINAN	45
7. SOSIAL LAINNYA	50

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Denpasar 2010-2020	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Denpasar 2012-2016	4
Tabel 1.3	Angka Beban Ketergantungan per Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2010-2020	9
Tabel 1.4	Proporsi Wanita Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama, 2015-2016	12
Tabel 1.5	Presentase Wanita Yang Sedang Menggunakan Kontrasepsi Menurut Alat/ Cara kontrasepsi, Kota Denpasar 2015-2016	13
Tabel 2.1	Persentase Balita yang Pernah diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Denpasar, 2015-2016	17
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Masih Diberi ASI di Kota Denpasar, 2015-2016	19
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2016	21
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015-2016	24
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidik dan jenis Kelamin, 2015-2016	26
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015-2016	28
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Pendidikan dan Jenis Kelamin	29
Tabel 3.5	Rasio Murid-Guru di Kota Denpasar per Tahun Ajaran 2012-2015	30
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013-2015	32
Tabel 5.1	Rumah Tangga Menurut Indikator Lantai terluas (%), Tahun 2015-2016	37
Tabel 5.2	Rumah Tangga Menurut Indikator Atap Terluas Tahun 2015-2016 (%)	39
Tabel 5.3	Rumah Tangga Menurut Indikator Dinding Terluas (%), Tahun 2015-2016	39
Tabel 5.4	Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita (%), Tahun 2015-2016	40
Tabel 5.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2015-2016	43
Tabel 5.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Denpasar, Tahun 2015-2016	44
Tabel 6.1	Garis Kemiskinan di Provinsi Bali Menurut kategori Kota dan Desa Tahun 2011-2016	47
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase dan Garis Kemiskinan per kabupaten/ Kota di Bali Maret 2015 dan 2016	48
Tabel 7.1	Persentase Penduduk yang Bepergian dalam Enam Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015-2016	50
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga yang Menerima BSM di kota Denpasar, tahun 2015-2016	55
Tabel 7.3	Persentase Penduduk yang Pernah menjadi Korban Kejahatan di Kota Denpasar, Tahun 2015-2016	58

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
Gambar 1.1	Jumlah Penduduk(000 Orang), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2
Gambar 1.2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Rasio Denpasar 2012-2016	6
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Kota Denpasar Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2016	5
Gambar 1.4	Sebaran Penduduk Kota Denpasar Per Kecamatan Tahun 2010, 2016 & 2020	6
Gambar 1.5	Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Per Km ² , Tahun 2010, 2016 & 2015	7
Gambar 1.6	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016	8
Gambar 1.7	Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Denpasar Tahun 2014-2016	10
Gambar 1.8	Persentase Perempuan Pernah kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kota Denpasar 2015-2016	11
Gambar 1.9	Persentase Perempuan yang Menikah di Bawah Umur (<19 Tahun) di Kota Denpasar Tahun 2015-2016	12
Gambar 1.10	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB Kota Denpasar 2015-2016	13
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup Kota Denpasar Tahun 2010-2016	16
Gambar 2.2	Perbandingan AHH Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016	16
Gambar 2.3	Persentase Penduduk Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi Air Susu Ibu di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015-2016	17
Gambar 2.4	Persentase Balita yang Pernah diimunisasi, 2015-2016	18
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Usia Kurang dari 2 Tahun yang Masih Diberi Air Susu Ibu di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2016	19
Gambar 2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, 2015-2016	20
Gambar 2.7	Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Denpasar Tahun 2016	22
Gambar 2.8	Persentase Penduduk kota Denpasar yang Berobat Jalan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2016	22
Gambar 3.1	Angka Melek Huruf per Kelompok Umur Tahun 2015-2016	23
Gambar 3.2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Denpasar, 2015-2016	25
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Usia 15+ Menurut Ijasah, 2015-2016	26
Gambar 3.4	Persentase Penduduk menurut Ijasah & jenis Kelamin 2016	27
Gambar 3.5	APM Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin 2016	29
Gambar 3.6	Rasio Murid Guru Per Jenjang Pendidikan, 2015-2016	31
Gambar 4.1	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Denpasar, Menurut Jenis Kelamin 2013-2015	33
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Denpasar Menurut Jenis Kelamin, 2013-2015	34
Gambar 5.1	Persentase Rumah Berlantai Tanah di Denpasar, 2016 (%)	38
Gambar 5.2	Persentase Rumah Menurut Jenis Atap di Denpasar, 2016 (%)	38
Gambar 5.3	Persentase Rumah Menurut Jenis Dinding di Kota Denpasar, 2016 (%)	39
Gambar 5.4	Persentase Rumah tangga Menurut Luas Lantai per Kapita \geq 10, di Denpasar 2016 (%)	40
Gambar 5.5	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Perumahan di Denpasar, 2016 (%)	41
Gambar 5.6	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah di Kota Denpasar, Tahun 2016 (%)	44
Gambar 5.7	Persentase Rumah Tangga dengan Status Rumah Milik Sendiri di Kota Denpasar, Tahun 2016 (%)	44

No	Judul	Hal
Gambar 7.1	Persentase Penduduk Menurut maksud Utama Bepergian di Kota Denpasar, Tahun 2015-2016	51
Gambar 7.2	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Raskin Menurut Jumlah Beras yang Dibeli di Kota Denpasar, Tahun 2015-2016	53
Gambar 7.3	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Menurut Jenisnya di Kota Denpasar, Tahun 2015-2016	54
Gambar 7.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset di Kota Denpasar, Tahun 2015-2016	56

<https://denpasarkota.bps.go.id>

MAKLUMAT:

Selain **Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2016** juga diterbitkan **Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2016**

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2016 hanya menampilkan tabel-tabel pokok hasil SUSENAS 2016

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2016 menyajikan analisis lebih lanjut dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2016, dilengkapi indikator terkait lainnya dari berbagai sumber

1. KEPENDUDUKAN

Dinamisnya kehidupan masyarakat Kota Denpasar serta terus meningkatnya pembangunan fisik kota menimbulkan bebrbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan beerbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Denpasar dituntut untuk dapat terus meningkatkan pembangunan pada seluruh aspek guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari penduduk, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Denpasar kreatif adalah “Denpasar kota hidup”. Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan dia atas landasan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan visi Kota

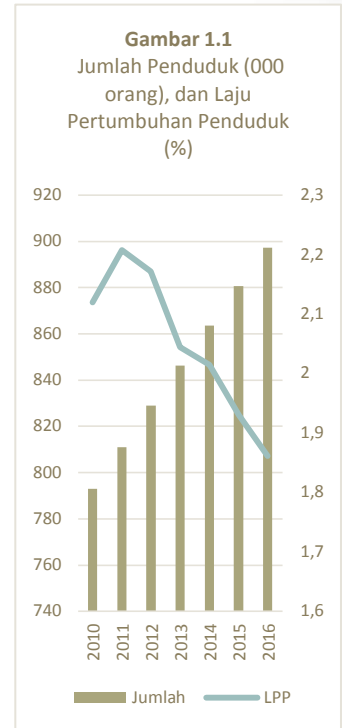
Denpasar “Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan”.

Misi Pemerintah Kota Denpasar dalam pembangunan di bidang kependudukan tidaklah mudah. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, penduduk bisa menjadi beban dalam pembangunan. Sebelum melihat kualitas penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga sudah menjadi masalah serius yang menjadi konsen pemerintah daerah khususnya Kota Denpasar. Potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur maupun sebaran antar wilayahnya.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Dari sisi jumlah penduduk, jumlah penduduk Kota Denpasar tidak begitu besar dibandingkan dengan jumlah total penduduk Provinsi Bali. Dengan jumlah penduduk sekitar 897,3 ribu orang di tahun 2016, penduduk Kota Denpasar tidak lebih dari 25 persennya jumlah penduduk Provinsi Bali yang mencapai hampir 4,2 juta orang. Pada Sensus Penduduk terakhir (2010), jumlah penduduk Kota Denpasar hanya sebesar 793,0 ribu jiwa. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah, hingga di tahun 2020 nanti jumlah penduduk Kota Denpasar diperkirakan mencapai 962,91 ribu jiwa.

Melihat laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada beberapa tahun terakhir menunjukkan trend penurunan. Dari hasil sensus penduduk (2010) laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar sempat tumbuh pesat pada tahun 2011, sebagai dampak bertambahnya kaum urban yang datang ke



Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020

Kota Denpasar untuk mencari penghidupan sehingga di tahun tersebut terjadi peningkatan. Dengan gencarnya pengendalian penduduk pendatang di Kota Denpasar, tahun 2012-2016 terjadi penurunan pertumbuhan penduduk serta program Keluarga Berencana (KB) kala itu. Secara berurutan tahun 2010 (2,12 %); 2011 (2,21%); 2012 (2,17%); 2013 (2,04%); 2014 (2,01%); 2015 (1,93%) dan 2016 (1,86%).

Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kota Denpasar 2010 – 2020 (ribuan)

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
2010	404,70	388,30	793,00
2016	458,30	439,00	897,30
2020	491,50	471,40	962,90

Sumber : Proyeksi Penduduk, Sensus Penduduk 2010

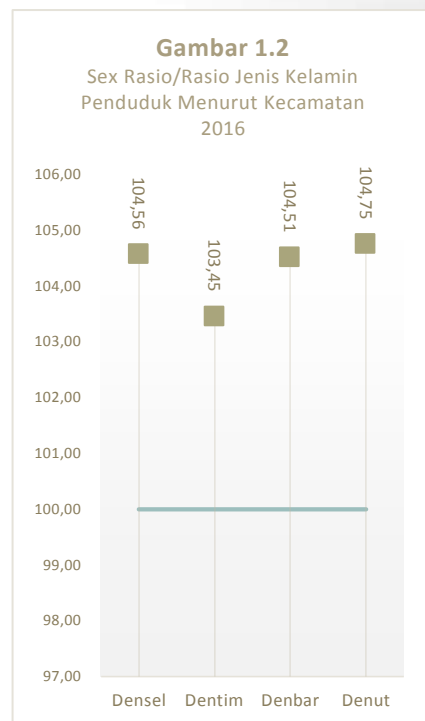
Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/sex ratio (SR) antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar relatif berimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan, meskipun jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2010, 2016, dan perkiraan di tahun 2020, sex ratio penduduk Kota Denpasar pada kisaran 106. Jumlah penduduk Kota Denpasar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, dengan perbandingan 106 orang laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Dominasi jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan terlihat di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Utara. Sex ratio penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2016 diperkirakan mencapai rasio 104, yang artinya ada 104 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Terdapat kecenderungan daerah-daerah tujuan migran, seperti daerah perkotaan, dan pusat-pusat perekonomian memiliki *sex ratio* di atas 100. Daerah dimaksud antara lain Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar. Hal ini tidak terlepas dari pola migrasi yang cenderung dilakukan oleh penduduk laki-laki sebagai tulang punggung rumah tangga. Tarikan ketiga wilayah ini terhadap penduduk sekitarnya akan lebih terlihat pada pola sebaran dan kepadatan penduduk.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Selain laju pertumbuhan penduduk, yang juga menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk adalah sebaran dan kepadatan penduduk. Sebaran penduduk lebih dipengaruhi oleh pola migrasi baik migrasi ke luar maupun migrasi masuk. Pola migrasi ini terkait dengan faktor pendorong dari daerah asal migran dan besarnya tarikan dari daerah tujuan migrasi. Sebagai daerah tujuan wisata yang menjadi provinsi Bali, Kota Denpasar tidak hanya memiliki daya tarik obyek wisata dan atraksi budaya. Perkembangan ekonomi Kota Denpasar khususnya dari sisi pariwisata, menciptakan cukup banyak lapangan kerja yang juga menarik bagi pencari kerja.

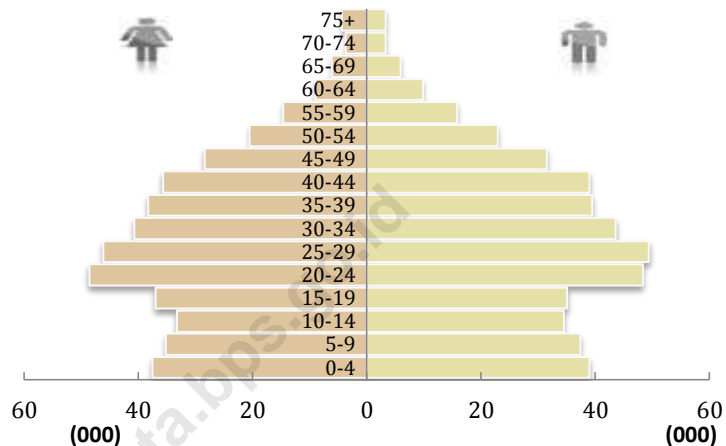
Gambaran piramida penduduk Kota Denpasar 5 tahun terakhir memperlihatkan bagaimana perkembangan penduduk Kota Denpasar lebih dipengaruhi oleh faktor non-alamiah yakni migrasi. Perkembangan piramida penduduk yang cenderung melebar antara tahun 2010 dan 2016, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur, bukan semata diakibatkan



oleh pergeseran antar kelompok umur (kohor), namun akibat penambahan dari penduduk luar di masing-masing kelompok umurnya.

Gambar 1.3

Piramida Penduduk Kota Denpasar
Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2016



Sumber : Proyeksi Penduduk, Sensus Penduduk 2010

Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa penduduk Kota Denpasar relatif *immobile* dalam artian ada keengganan penduduk untuk berpindah dari tempat kelahiran ke lain tempat namun dari sebaran penduduk antar Kecamatan terlihat adanya ketimpangan. Penduduk kecamatan yang paling padat pada 4 wilayah kecamatan di Kota Denpasar yang tergolong perkembangan sangat pesat khususnya dari letak geografisnya antara lain Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Barat. Wilayah yang hanya mencakup kurang dari sepertiga dari total wilayah Kota Denpasar dihuni oleh hampir setengah penduduk Denpasar (60,83 %). Proporsi penduduk di wilayah ini juga terus mengalami peningkatan.

Ketimpangan sebaran penduduk juga dapat dilihat dari kepadatan penduduknya. Kota Denpasar merupakan satu-

satunya daerah perkotaan yang ada di Bali, disamping itu Kota Denpasar juga merupakan pusat pemerintahan Provinsi Bali. Kota Denpasar merupakan daerah terpadat di Provinsi Bali. Dengan luas yang tidak lebih dari 2 persen dari total luas wilayah Provinsi Bali, kepadatan Kota Denpasar di tahun 2016 mencapai 702 jiwa per Km². Angka ini hampir mendekati dari tingkat kepadatan Provinsi Bali yang hanya sebesar 745 jiwa per Km².

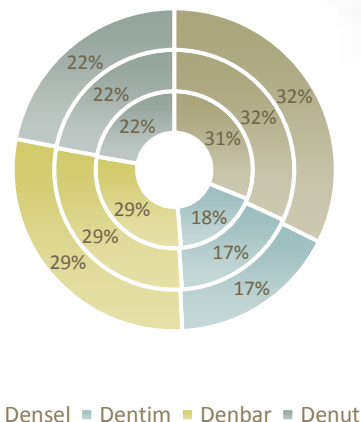
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Denpasar, 2012 -2016

Uraian	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	Sex Ratio (L/P) %
2012	828,9	6.487	106,51
2013	846,2	6.622	106,45
2014	863,6	6.758	106,39
2015	880,6	6.892	106,36
2016	897,3	7.022	106,31

Sumber : Proyeksi Penduduk, Sensus Penduduk 2010

Wilayah yang paling padat di Provinsi Bali adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Memang tidak bisa dipungkiri ketiga wilayah ini memberikan daya tarik bagi penduduk lainnya, mengingat keunggulan wilayah ini dari sisi perkembangan ekonomi dan ketersediaan berbagai fasilitas seperti kesehatan maupun pendidikan. Padatnya penduduk di Kota Denpasar misalnya, erat kaitannya dengan fungsi sentral dari Kota Denpasar disamping sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pendidikan

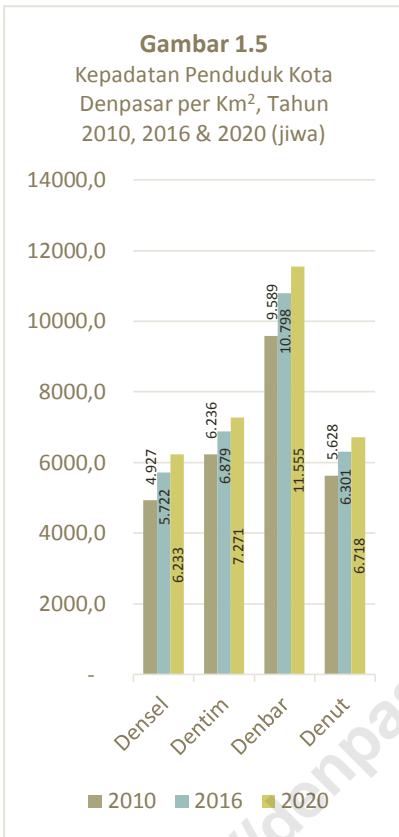
Gambar 1.4
Sebaran Penduduk Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2010, 2016 & 2020



Sumber : Proyeksi Penduduk, Sensus Penduduk 2010

maupun kesehatan. Sementara Kabupaten Badung merupakan wilayah yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*) khususnya pada industri pariwisata. Kabupaten Gianyar di samping merupakan salah satu pusat industri pariwisata, juga merupakan wilayah peri urban (*periphery*) Kota Denpasar. Dengan berbatasan langsung dan jarak yang tidak terlampau jauh dengan Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar menjadi alternatif hunian bagi sebagian penduduk yang bekerja baik di Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam sebaran penduduk adalah penyebaran populasi penduduk ke arah urban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata urban memiliki dua arti yaitu yakni berkenaan dengan kota, atau bersifat kekotaan, dan proses perpindahan orang yang dari desa ke kota atau menurut BPS merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari hasil proyeksi, penduduk Provinsi Bali tergolong masyarakat urban. Data dari tahun 2010 menunjukkan proporsi penduduk urban di Kota Denpasar melampaui 60 persen. Dan di tahun 2020 nanti diperkirakan populasi penduduk urban di Kota Denpasar melebihi 80 persen. Ini tentu membutuhkan perhatian khusus mengingat mayoritas penduduk kota Denpasar masih kental dengan budaya dan tradisinya. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan menimbulkan pergeseran struktur sosial budaya masyarakat Kota Denpasar.

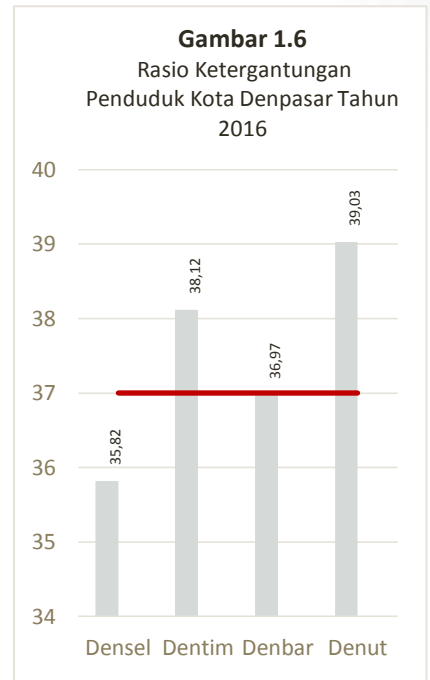


Sumber : Proyeksi Penduduk, Sensus Penduduk 2010

Angka Beban Ketergantungan

Rasio antara penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif dikenal dengan angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan merupakan suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Semakin besar penduduk non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, semakin besar angka beban ketergantungannya. Secara ekonomi, hal ini juga menggambarkan besarnya beban ekonomi penduduk yang bekerja (produktif) untuk menanggung penduduk yang belum bekerja dan tidak bekerja lagi (non produktif).

Dari perbandingan komposisi antara penduduk produktif (15 – 64 tahun) dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), penduduk Kota Denpasar tergolong dalam penduduk produktif. Bahkan sejak tahun 1995 bisa dikatakan Bali telah memasuki masa Bonus Demografi (BD), yang secara harfiah berarti komposisi struktur umur penduduk idealnya mampu memberikan keuntungan secara ekonomi akibat besarnya penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja. Untuk bisa berhasil meraih peluang emas yang dikenal dengan “*the windows of opportunity*” ini, tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan lapangan kerja yang mampu menampungnya.



Sumber : Proyeksi Penduduk, Sensus Penduduk 2010

Meskipun secara umum Kota Denpasar telah mencapai rasio ketergantungan mencapai 37,24 persen, namun pada tingkat Kecamatan tercatat bahwa Kecamatan Denpasar Utara memiliki rasio ketergantungan tertinggi yaitu 39,03 persen. Bahkan tahun 2016, rasio ketergantungan di ketiga Kecamatan lainnya masih berada di dibawah Kecamatan Denpasar Utara. Namun demikian, di tahun 2020 nanti diperkirakan hampir semua Kecamatan akan mencapai Bonus Demografi.

Tabel 1.3. Angka Beban Ketergantungan per Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2000 – 2020

Kecamatan	Kelompok Umur			Dependency Ratio (%)	Child	Old
	0-14	15-64	65+		Dependency Ratio (%)	Dependency Ratio (%)
Denpasar Selatan	68.340	210.620	7.100	35,82	32,45	3,37
Denpasar Timur	36.610	111.120	5.750	38,12	32,95	5,17
Denpasar Barat	63.030	189.670	7.090	36,97	33,23	3,74
Denpasar utara	48.820	142.390	6.760	39,03	34,29	4,75
Kota Denpasar	216.800	653.800	26.700	37,24	33,16	4,08

Sumber : Proyeksi Penduduk, Sensus Penduduk 2010

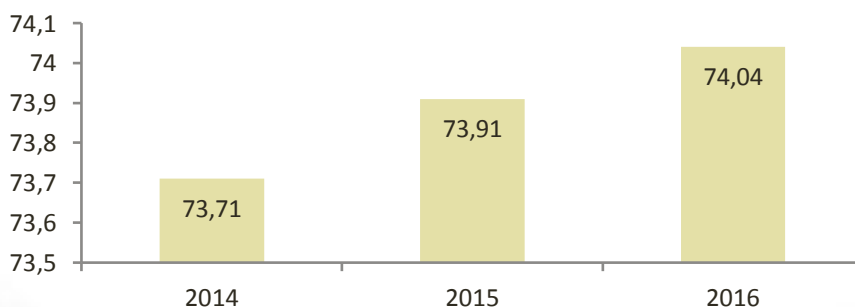
Ageing population merupakan isu kependudukan kekinian yang terkait pula dengan komposisi penduduk. Secara natural manusia atau penduduk akan bergerak menuju masa ini. Ketika komposisi penduduk berusia 60 tahun ke atas semakin banyak, suatu negara atau wilayah dikatakan mengalami *ageing population*. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya tingkat fertilitas dan tingkat kematian, serta semakin panjangnya usia harapan hidup penduduk. Pada tahun 2016 ini, populasi penduduk Kota Denpasar bisa dikatakan sudah memasuki *aging population*, bahkan 5 tahun

mendatang kondisi ini terus meningkat. Hal ini tentu berdampak pada ketersediaan jaminan hari tua, serta berbagai fasilitas pendukung penduduk bagi kelompok lanjut usia ini.

Taraf Kesehatan Masyarakat

Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena dengan penduduk yang sehat pembangunan diharapkan dapat berjalan lancar. Keadaan kesehatan masyarakat juga merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin baik keadaan kesehatan masyarakat, kesejahteraan tersebut semakin baik dan sebaliknya. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dikaitkan dengan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi. Salah satu indikator nyata yang secara langsung dapat dilihat adalah dengan ukuran kesehatan jasmani yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis. diperkirakan hanya sebesar 0,90. Angka NRR di bawah 1 (satu) secara sederhana berarti jumlah kelahiran bayi perempuan di tahun 2020 nanti tidak akan mampu menggantikan populasi perempuannya.

Gambar 1.7
Angka Harapan Hidup Penduduk Kota
Denpasar Tahun 2014-2016

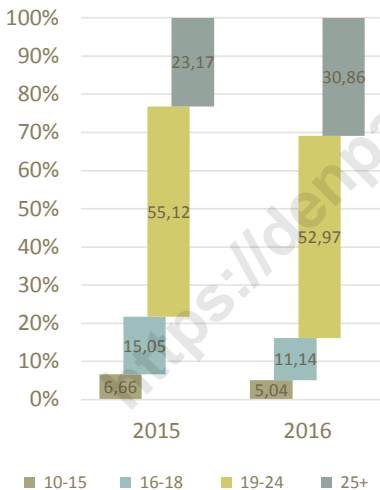


Sumber : Susenas 2014 - 2016

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Denpasar menunjukkan perkembangan yang berarti, dimana terlihat pada gambar 1.7, angka harapan hidup penduduk Kota Denpasar selama kurun waktu 3 tahun menunjukkan peningkatan, yang semula pada Tahun 2014 angka harapan hidup sebesar 73,71 tahun meningkat menjadi 73,91 tahun pada Tahun 2015. Hingga Tahun 2016 angka harapan hidup penduduk Kota Denpasar menjadi 74,04 tahun. Angka harapan hidup yang terus meningkat tersebut memperlihatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dinilai cukup berhasil. Karena angka harapan hidup merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah dari segi peningkatan kesehatan penduduk.

Gambar 1.8

Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama, di Kota Denpasar 2015-2016



Sumber : Susenas 2015 - 2016

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama penduduk perempuan merupakan salah satu indikator yang terkait fertilitas. Semakin dini usia perkawinan, semakin panjang rentang masa reproduksi dan semakin besar peluang melahirkan lebih banyak anak. Usia perkawinan pertama juga menjadi indikator kesehatan khususnya bagi perempuan. Perkawinan di usia terlalu muda meningkatkan resiko pada kematian bayi yang dilahirkan. Perkawinan di usia muda memperkecil peluang perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ini terkait dengan kematangan fisik dan mental serta pengetahuan reproduksi bagi perempuan di kala melahirkan dan merawat anak yang dilahirkannya.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia perkawinan perempuan ini

sempat menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun demikian dalam undang-undang perlindungan anak, batas usia minimal perempuan untuk menikah ditingkatkan menjadi 18 tahun. Di sisi lain BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terus menggalakan usia perkawinan ideal perempuan pada saat umur 21 tahun.

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebagian besar wanita di Bali menikah pada umur ideal (21-24 tahun) dengan persentase sebesar 52,97 persen di tahun 2016, menurun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 55,12 persen. Pergeseran ini terjadi karena peningkatan pada proporsi wanita menikah pada kelompok umur 25 tahun ke atas dan kelompok umur 19-20 tahun.

Mengacu ke Undang-undang perkawinan, proporsi wanita pada pernikahan pertama berumur di atas 16 tahun pada tahun 2016 lebih dari 90 persen, tepatnya 64,11 persen. Namun demikian masih ditemukan 5,04 persen perempuan menikah pada umur yang sangat belia, di bawah 16 tahun, pada masa di mana mereka seharusnya sedang mengenyam pendidikan dasar.

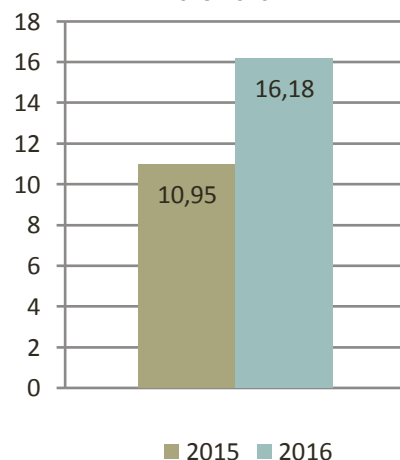
Tabel 1.4 Proporsi Wanita Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama, Kota Denpasar, 2015- 2016

Tahun	Kelompok Umur					Jumlah
	≤ 16	17-18	19-20	21-24	≥ 25	
2015	3.25	7.70	15.27	50.08	23.70	100
2016	5.04	11.14	17.02	35.95	30.86	100

Sumber : Susenas 2015-2016

Pada tahun 2016, umur perkawinan wanita di Kota Denpasar terlihat lebih besar dibanding tahun sebelumnya yaitu 10,95 persen tahun 2015. Tahun 2016 usia perkawinan pertama yang dominan adalah pada usia 21 tahun keatas sebesar 66,81 persen.

Gambar 1.9
Persentase Perempuan Yang Menikah di Bawah Umur (<19 Tahun) di Kota Denpasar Tahun 2015-2016



Sumber : Susenas 2015 - 2016

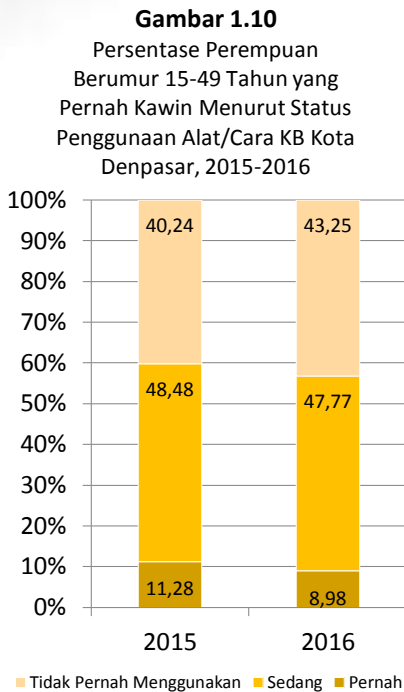
Penggunaan Alat/Cara KB

Penurunan tingkat fertilitas tidak terlepas dari intervensi pemerintah melalui berbagai program, salah satunya program Keluarga Berencana (KB). Melalui program ini, intervensi terhadap faktor pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menggalakkan penggunaan alat kontrasepsi atau lebih dikenal dengan alat KB. Dengan berbagai programnya, program KB diharapkan mampu meningkatkan cakupan akseptor KB terutama penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implant, termasuk penggunaan metode kontrasepsi permanen/steril seperti vasektomi dan tubektomi.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Yang Sedang Menggunakan Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi, Kota Denpasar Tahun 2015-2016

Alat/Cara Kontrasepsi	2015	2016
MOW/Tubektomi	7.15	10.41
MOP/Vasektomi	0.00	0.82
AKDR/IUD/Spiral	28.35	24.00
Suntikan	37.96	39.15
KB/Norplant/Implanon/alwalit	3.17	1.67
Pil	19.15	17.82
Kondom/karet	2.82	0.82
Intravag/tissue/kondom wanita	0.00	0.00
Cara tradisional	1.41	1.63
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	48.48	47.77

Sumber : Susenas 2015-2016



Sumber : Susenas 2015-2016

Dibanding tahun 2015, pengguna alat kontrasepsi cenderung menurun. Persentase wanita yang berumur 15 – 49 tahun yang berstatus kawin dan sedang menggunakan alat kontrasepsi menurun dari 48,48 persen di tahun 2015 menjadi 47,77 persen di tahun 2016. Hal yang cukup menggembirakan adalah penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yang masih dominan berada di atas 94,70 persen. Demikian halnya penggunaan metode kontrasepsi permanen, persentase wanita umur 15- 49 yang berstatus kawin dan menggunakan metode kontrasepsi ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015 persentasenya hanya sebesar 7,15 persen, meningkat di tahun 2016 dengan persentase tercatat di atas 11 persen.

<https://denpasarkota.bps.go.id>

2. KESEHATAN DAN GIZI

Sumber daya manusia (SDM) yang besar jika tidak dibarengi dengan kualitas yang sepadan justru akan menjadi beban. Salah satu yang dapat menunjukkan kualitas SDM adalah indikator di bidang kesehatan. Presiden RI pada suatu kesempatan menyampaikan bahwa bangsa yang maju, bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat, jadi tanpa kesehatan jangan harap negara maju. Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. SDM yang sehat akan mampu secara maksimal mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu wilayah, khususnya pembangunan ekonominya.

Oleh karena itu, berbagai program terkait peningkatan kesehatan masyarakat terus digalakkan dan disempurnakan. Porsi anggaran kesehatan baik pada APBD maupun APBN pun mengalami peningkatan. Bahkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari APBN menjadi salah satu fokus APBN. Anggaran ini nantinya akan diarahkan dalam bentuk peningkatan status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk Kota Denpasar, besaran anggaran kesehatan pada APBD (2016) bahkan sudah mencapai 17,29 persen,

sesuai dengan amanat undang-undang dimana anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD.

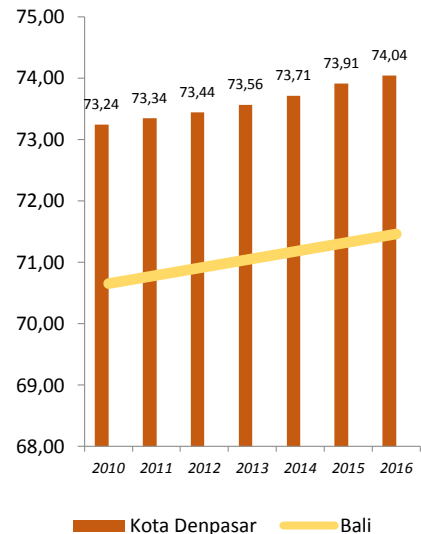
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Besarnya porsi anggaran kesehatan jika di manfaatkan dengan baik tentu akan berdampak pada perbaikan berbagai indikator kesehatan yang ada. Keberhasilan atas berbagai program terkait kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain peningkatan angka harapan hidup (AHH).

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Kota Denpasar Tahun 2010 – 2020, angka harapan hidup, yang dalam hal ini diukur dari angka harapan hidup saat lahir (E0) cenderung meningkat. Angka harapan hidup Kota Denpasar di tahun 2010 telah mencapai di atas 73 tahun (73,24 tahun). Angka harapan hidupnya terus meningkat hingga di tahun 2016 mencapai 74,04 tahun, dan pada tahun 2020 mendatang angka harapan hidup penduduk Bali diperkirakan melampaui 78 tahun.

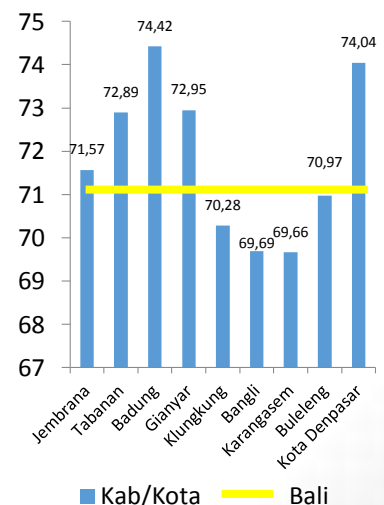
Perkembangan AHH di wilayah kabupaten/kota se-Bali bervariasi. Pada tahun 2016, AHH tertinggi dimiliki penduduk di Kabupaten Badung dengan harapan hidup di atas 74 tahun. Angka harapan hidup terendah ada pada penduduk Kabupaten Karangasem. AHH ini menunjukkan anak yang lahir pada tahun 2016 di Kabupaten Karangasem secara rata-rata diperkirakan hanya mampu bertahan hidup hingga umur 69,66 tahun. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Bali antara lain Kota Denpasar (74,04 tahun), Kabupaten Gianyar (72,95 tahun), Kabupaten Tabanan (72,89 tahun) dan Kabupaten Jembrana (71,57 tahun). Sementara itu kabupaten

Gambar 2.1
Angka Harapan Hidup Kota Denpasar Tahun 2010-2016



Sumber : IPM Kota Denpasar 2016

Gambar 2.2
Perbandingan AHH Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016



Sumber : IPM Provinsi Bali 2016

dengan AHH lebih rendah dari provinsi, berturut-turut, Kabupaten Buleleng, Klungkung, Bangli dan Karangasem. bahkan belum mencapai 70 tahun di tahun 2016.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Tingkat kesehatan penduduk dapat didekati dari tingkat kesehatan balitanya. Selain dari tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kesehatan balita setidaknya dapat diukur dari tingkat imunitas dan kualitas gizi balita. Tingkat imunitas diukur dari persentase balita yang pernah diimunisasi menurut jenis imunisasi. Sementara status gizi balita didekati dengan indikator persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang masih diberi Air Susu Ibu (ASI). Indikator yang disampaikan di sini bersumber dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Imunisasi menjadi salah satu indikator kesehatan mengingat imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh agar tubuh membuat zat anti bodi untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Dengan imunisasi diharapkan tingkat kematian bayi menurun dan meningkatkan peluang hidup (harapan hidup) bagi bayi yang dilahirkan.

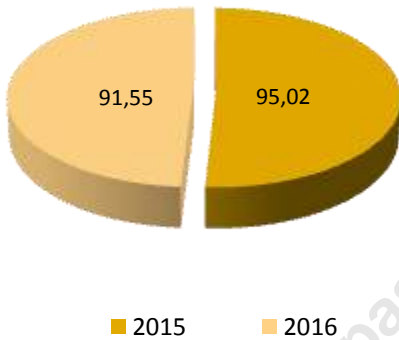
Tabel 2.1 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Denpasar, 2015-2016

Jenis Imunisasi	2015	2016
BCG	97.56	98.44
DPT	95.15	92.44
Polio	96.69	95.60
Hepatitis B	94.38	95.18
Campak (atau MMR)	81.40	81.79

Sumber : Susenas 2015- 2016

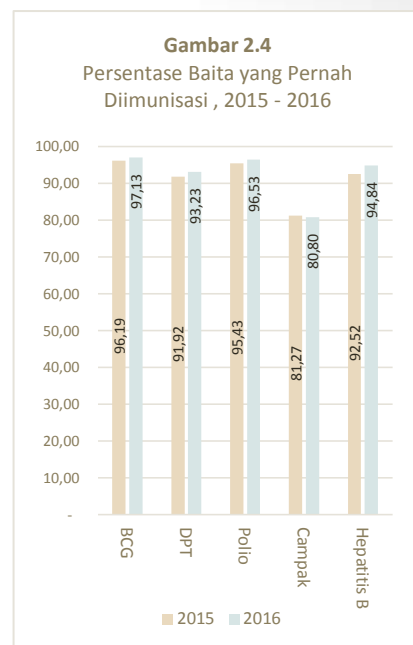
Gambar 2.3

Persentase Penduduk Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi Air Susu Ibu di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015- 2016



Sumber : Susenas 2016-2016

Berdasarkan data yang ada sebagian besar bayi telah mendapatkan 5 imunisasi yang diwajibkan pemerintah (imunisasi wajib), antara lain BCG (Bacille Calmette-Guérin), DPT (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), Polio, campak dan Hepatitis B. Perbandingan data antara tahun 2015 dan 2016 persentase bayi yang mendapat imunisasi tersebut bahkan cenderung meningkat. Jika ditahun 2015 persentase balita yang mendapatkan imunisasi wajib berkisar antara 94-97 persen (kecuali imunisasi campak hanya 81 persen), meningkat menjadi pada kisaran 92 – 98 persen di tahun 2016. Pemberian imunisasi Campak/MMR kiranya perlu mendapat perhatian karena persentase balita yang memperoleh imunisasi ini hanya pada kisaran 80 persen pada tahun 2016.



Sumber : Susenas 2015- 2016

Kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan kiranya menjadi salah satu faktor tingginya persentase balita yang memperoleh imunisasi wajib, disamping faktor ekonomi dan pendidikan orang tua. Asupan gizi untuk balita juga menjadi salah satu indikator kesehatan khususnya untuk ibu dan balita. Ini didekati dari persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang masih diberi air susu ibu (ASI). Berdasarkan data tahun 2016 persentase anak pada umur tersebut yang pernah disusui cenderung turun dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 persentase anak yang masih mendapat ASI sebesar 80,67 persen. Pada tahun 2016, hanya 67,47 persen anak usia di bawah 2 tahun yang masih mendapat ASI. Persentase anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang masih diberi ASI cenderung lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Di tahun 2016 persentase anak laki-laki kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI tercatat sebesar 77,80 persen. Sementara persentase anak

perempuan pada umur yang sama yang masih diberi ASI sebesar 58,29 persen.

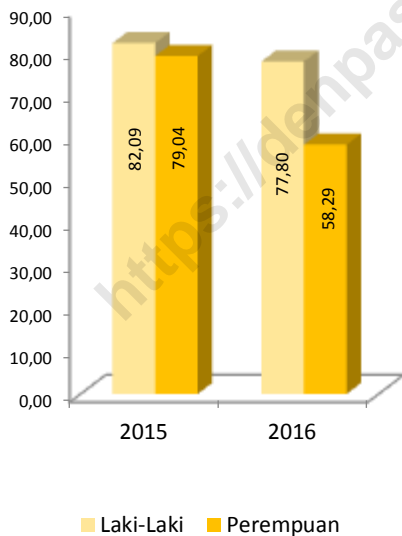
Tabel 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Masih Diberi ASI di Kota Denpasar, 2015 - 2016

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	L+P
2015	82.09	79.04	80.67
2016	77.80	58.29	67.47

Sumber : Susenas 2015- 2016

Gambar 2.5

Persentase Penduduk Usia Kurang dari 2 Tahun yang Masih Diberi Air Susu Ibu di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015- 2016



Sumber : Susenas 2015-2016

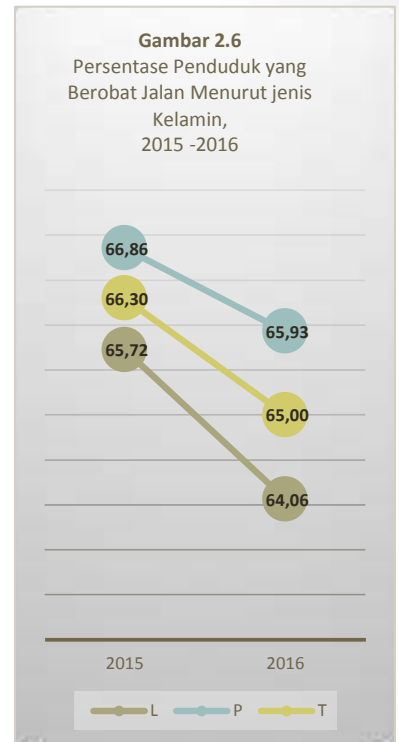
Meskipun pemberian ASI eksklusif dilakukan mulai usia bayi 0-6 bulan, namun idealnya pemberian ASI dilakukan hingga anak berusia 2 tahun, diimbangi dengan makanan tambahan. Pemberian ASI terhadap bayi hingga umur 2 tahun di tengarai akan memeberikan dampak positif pada perkembangan bayi. Kiranya hal ini dapat merefleksikan derajat kesehatan bayi yang disuatu daerah. Persentase anak di bawah umur 2 tahun yang masih diberi ASI di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 80,47 persen. Sementara proporsi bayi yang masih diberi ASI hingga umur 2 tahun pada tahun 2016 tercatat menurun di Kota Denpasar dengan proporsi hanya 67,47 persen.

Terlepas dari kondisi sosial ekonomi rumah tangga di masing-masing Kota Denpasar, kondisi ini kiranya dapat merepresentasikan perilaku pemberian ASI yang ideal antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Para ibu di perkotaan cenderung memiliki aktivitas yang tinggi sehingga waktu menyusui berkurang. Sementara para ibu di perdesaan cenderung memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyusui.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Apalagi jika melihat tingkat kesakitan penduduk Bali masih tergolong tinggi. Tingkat kesakitan atau morbiditas dihitung dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan (sakit) hingga terganggunya aktivitas. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Meskipun mengalami keluhan kesehatan nampaknya tidak semua penduduk serta merta berobat pada fasilitas kesehatan maupun tempat berobat lainnya. Hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan yang berkisar di bawah 70 persen. Pada tahun 2016 persentase penderita keluhan kesehatan yang berobat jalan menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 persentasenya mencapai 66,30 persen, menurun pada tahun 2016 tercatat mencapai 65 persen. Kecenderungan untuk berobat jalan tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi penduduk namun juga tidak terlepas dari akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan jaminan kesehatan yang belakangan makin ditingkatkan seperti kartu “sewaka karya guna”, maupun JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).



Sumber : Susenas 2015- 2016

Terdapat perbedaan persentase penduduk yang berobat jalan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Persentase penduduk perempuan yang berobat jalan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang berobat jalan pada tahun 2016 hampir mencapai 49,75 persen, sementara penduduk laki-laki hanya sekitar 48,09 persen.

Dari penduduk yang berobat jalan, praktek dokter/klinik menjadi tempat tujuan yang paling umum. Di tahun 2016, penduduk yang berobat jalan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan ini mencapai 50,37 persen. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi di tahun 2015, di mana fasilitas kesehatan ini hanya dimanfaatkan oleh 55,12 persen penduduk yang berobat jalan. Tentu hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya praktek dokter/klinik yang memfasilitasi program JKN, dan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan lebih lanjut, salah satu persyaratannya adanya rujukan dari fasilitas kesehatan 1 (dokter keluarga, klinik yang ditunjuk dan puskesmas).

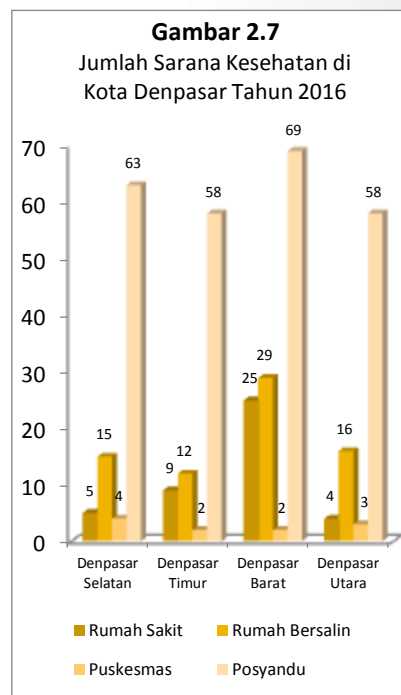
Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2016

Tempat Berobat	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
RS Pemerintah	9.71	8.19	6.14	8.06	7.96	8.13
RS Swasta	10.32	11.22	8.53	12.99	9.45	12.10
Praktek Dokter/ Bidan	53.63	50.28	56.69	50.45	55.12	50.37
Klinik/ Praktek Dokter Bersama	17.51	17.77	14.02	16.85	15.81	17.31
Puskesmas/ Pustu	8.82	10.76	15.69	10.96	12.18	10.86
UKBM	0.00	0.67	0.76	0.67	0.37	0.67
Praktek Pengobatan Tradisional/ Alternatif	1.51	0.36	0.64	1.03	1.09	0.69
Lainnya	2.87	0.76	2.24	0.36	2.56	0.56

Sumber : Susenas 2015- 2016

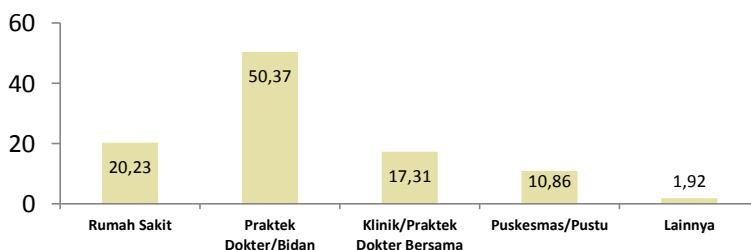
Sebagai fasilitas kesehatan pertama, puskesmas/pustu juga menjadi pilihan bagi penduduk yang berobat jalan. Pada tahun 2016 persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas ini untuk berobat jalan mencapai 19,03 persen dari penduduk yang memiliki keluhan kesehatan. Sementara rumah sakit (baik pemerintah maupun swasta) yang menjadi rujukan untuk pelayanan kesehatan lanjutan, persentase penduduk yang memilihnya untuk berobat jalan mencapai 10,86 persen. Meskipun tidak terlalu banyak (kurang dari 1 persen), pengobatan tradisional masih menjadi alternatif pengobatan bagi penduduk Kota Denpasar. Di tahun 2016 persentase penduduk yang berobat jalan dan memilih pengobatan tradisional sebagai tempat berobat sebesar 0,69 persen.

Pilihan tempat berobat antara fasilitas medis non medis tidak semata-mata disebabkan oleh faktor preferensi saja, namun juga dari ketersediaan dan penyebaran tenaga medis (dokter dan paramedis) di masing-masing wilayah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, jumlah puskesmas di Denpasar tahun 2016 telah mencapai 11 unit, meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Demikian halnya untuk jumlah paramedis meningkat dari 1,82 ribu orang di tahun 2016.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Kota Denpasar yang Berobat Jalan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2016



Sumber : Susenas 2015- 2016

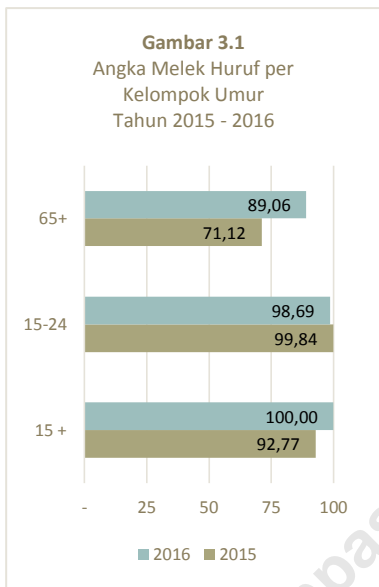
3. PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf (AMH)

Melek huruf adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Menurut UNESCO, Melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat menunjukkan perkembangan intelektual suatu wilayah, selain itu angka melek huruf juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Selama periode waktu tahun 2015 hingga 2016, secara umum angka melek huruf mengalami peningkatan. Kecenderungan peningkatan ini, terjadi baik dilihat pada kelompok umur 15 tahun ke atas namun pada kelompok umur 15 – 24 tahun sedikit menurun. Sementara angka melek huruf penduduk usia tua (65 tahun ke atas) tercatat meningkat dengan persentase sekitar 80 persen. Hal ini kiranya akan sulit ditingkatkan mengingat penduduk pada kelompok ini tergolong penduduk yang tidak produktif dengan tingkat pendidikan yang cenderung rendah.

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang angka melek hurupnya mengalami peningkatan. AMH Kota Denpasar meningkat dari 97,96 persen pada tahun 2015 menjadi 98,68 pada tahun 2016.



Sumber : Susenas 2015- 2016

Ada beberapa hal yang kiranya dapat ditarik dari kondisi ini. Kota Denpasar sebagian besar merupakan daerah perkotaan yang tentunya akses terhadap pendidikan relatif lebih baik, wilayah ini merupakan tujuan migran baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan jenis kelamin, AMH laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding AMH perempuan. Pada tahun 2016 AMH laki-laki untuk kelompok umur 15 tahun ke atas tercatat sebesar 96,37 persen, sementara AMH perempuan hanya sebesar 89,23 persen. Untuk kelompok umur 15 sampai 24 tahun, AMH laki-laki dan perempuan relatif berimbang melampaui angka 99 persen. Ini bisa menjadi salah satu indikasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015 - 2016

Kelompok Umur	Laki		Perempuan		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
15 +	99.31	100.00	96.56	100.00	97.96	100.00
15 - 24	100.00	99.56	100.00	97.76	100.00	98.69
65 +	91.22	100.00	70.30	80.33	80.23	89.05

Sumber : Susenas 2015-2016

Rata-Rata dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*) adalah banyaknya tahun belajar yang diselesaikan dalam pendidikan formal, dan tidak termasuk tahun yang mengulang. Dalam hal ini, usia penduduk yang diukur adalah penduduk yang berumur 25 tahun ke atas.

Rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah mencapai 10,44 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya rata-ratanya mengalami peningkatan hingga mencapai 11,14 tahun pada tahun 2016, sehingga secara umum, sudah mendekati wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Rata-rata lama sekolah penduduk di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah yang didominasi wilayah pedesaan. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung misalnya, rata-rata lama sekolahnya telah melampaui 9 tahun yang artinya rata-rata penduduknya sudah mengenyam pendidikan SLTA. RLS mencerminkan kondisi secara umum atau secara keseluruhan tingkat pendidikan penduduk, pada kelompok usia 25 tahun ke atas, kelompok usia di mana penduduk dianggap telah menyelesaikan pendidikan secara penuh. Untuk melihat lebih jauh kondisi pendidikan yang sedang berjalan kiranya bisa dilihat dari tingkat partisipasi penduduk dalam jenjang pendidikannya.



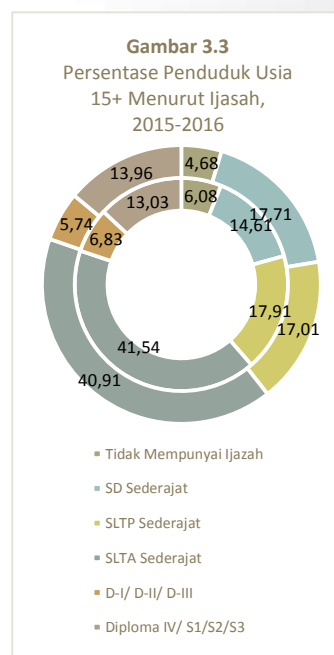
Sumber : Susenas 2015-2016

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, meningkatnya

tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi gambaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Tingkat pendidikan dapat dilihat dari ijazah terakhir yang dimiliki. Sepertiga lebih penduduk di atas 15 tahun telah berijazah setingkat SLTA. Pada tahun 2016 persentasenya mencapai 30,91 persen. Persentase penduduk yang berpendidikan setingkat SD masih cukup tinggi, dengan persentase mencapai 14,61 persen pada tahun 2015 dan 17,71 pada tahun 2016. Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah juga cukup tinggi meskipun cenderung menurun dibanding tahun 2015 lalu. Persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah pada tahun 2015 mencapai 6,08 persen, sementara tahun 2016 sebesar 4,68 persen. Yang cukup menggembirakan adalah peningkatan persentase penduduk dengan ijazah di atas SLTA (Diploma/S-1/S-2). Persentasenya mencapai 13,96 persen pada tahun 2016.

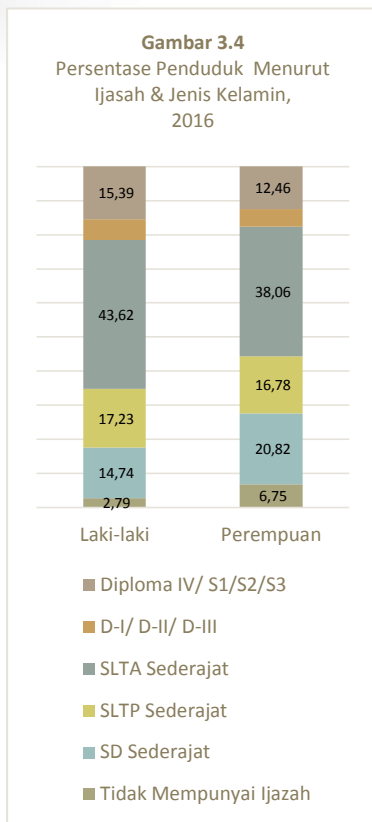


Sumber : Susenas 2015-2016

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2015 - 2016

Ijazah Yang Dimiliki	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Tidak Mempunyai Ijazah	3.24	2.79	9.01	6.75	6.08	6.68
SD Sederajat	13.55	14.74	15.70	20.82	14.61	17.71
SLTP Sederajat	16.55	17.23	19.31	16.78	17.91	17.01
SLTA Sederajat	45.66	43.62	37.30	38.06	41.54	40.91
D-I/ D-II/ D-III	7.56	6.23	6.08	5.23	6.83	5.74
Diploma IV/ S1/S2/S3	13.44	15.39	12.61	12.46	13.03	13.96

Sumber : Susenas 2015-2016



Sumber : Susenas 2015-2016

Tingkat pendidikan penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Ini bisa dilihat dari persentase penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah lebih rendah dibanding penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah hanya sebesar 2,79 persen. Sementara persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah mencapai 6,75 persen. Demikian halnya jika dilihat lebih jauh per jenjang pendidikan. Hal ini kiranya bisa menjadi gambaran bahwa peluang perempuan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi cenderung lebih rendah dibanding laki-laki. Pada tingkat pendidikan S-1 ke atas misalnya, persentase laki-laki yang memiliki ijazah pada tingkat pendidikan ini mencapai 15,39 persen. Sementara persentase untuk perempuan hanya 12,46 persen.

Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan indikator-indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sudut pandang berbeda juga dapat diartikan sebagai kemampuan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Berdasarkan data tahun 2016, APS Kota Denpasar untuk penduduk 5-6 tahun tercatat kurang dari 19 persen. Kiranya ini menjadi indikasi rendahnya persentase anak-anak yang mendapatkan pendidikan di usia dini. Namun demikian APS untuk usia 7-12 tahun telah mencapai lebih dari 98 persen, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia tersebut telah memperoleh pendidikan dasar. APS pada

kelompok usia 13-15 tahun juga terbilang cukup bagus baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2016 APS pada kelompok ini tercatat di atas 97 persen dan cenderung meningkat. Sementara pada kelompok usia lainnya, APS cenderung lebih rendah, namun meningkat dibanding tahun 2015. Secara umum, sebagian besar penduduk usia sekolah sudah dapat menikmati fasilitas pendidikan.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, 2015 - 2016

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
5 - 6	18.69	17.02	22.47	21.77	20.76	19.11
7 - 12	100.00	100.00	98.65	96.46	99.33	98.23
13 - 15	100.00	97.14	94.46	98.55	97.54	97.85
16 - 18	94.20	85.57	78.66	69.48	85.94	78.19
19 - 24	30.17	34.41	27.22	29.57	28.65	31.99

Sumber : Susenas 2015-2016

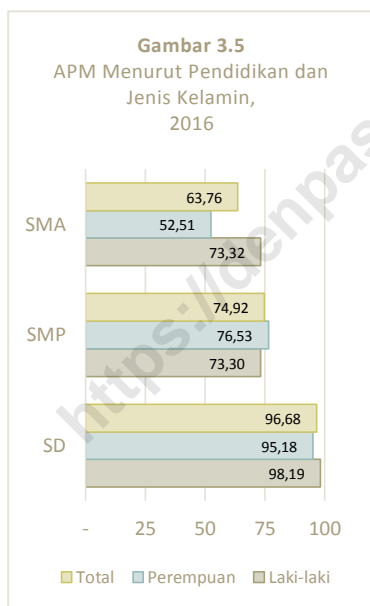
Dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum APS penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini terjadi hampir pada semua jenjang kelompok umur. Semakin tinggi jenjang kelompok umur, semakin tinggi perbedaan yang terlihat. Pada kelompok umur 16-18 tahun, pada tahun 2016, APS penduduk laki-laki mencapai 85,57 persen sedangkan penduduk perempuan hanya sebesar 69,48 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada kelompok umur 19-24 tahun. APS laki-laki tercatat sebesar 34,41, sementara APS Perempuan hanya 29,57 persen.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Pendidikan Dan Jenis Kelamin, 2015 - 2016

Jenjang Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
SD	95.89	98.19	92.95	95.18	94.44	96.68
SMP	92.20	73.30	82.36	76.53	87.83	74.92
SMA	81.90	73.32	71.93	52.51	76.61	63.76

Sumber : Susenas 2015-2016

Jika pada APS tidak memperhatikan jenjang pendidikan sesuai kelompok umur, maka pada Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan sesuai kelompok umur digunakan sebagai dasar penghitungan. Dengan cara penghitungan tersebut, maka APM dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dan juga proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya.



Sumber : Susenas 2015-2016

Sejalan dengan APS, angka APM juga menunjukkan perkembangan yang hampir sama selama dua tahun terakhir. Pada masing-masing jenjang pendidikan nilai APM menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Sementara itu, pola yang sama seperti APS, APM juga memperlihatkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka besaran APM semakin rendah.

Dilihat berdasarkan jenjang pendidikannya APM SD pada tahun 2016 mencapai 96,68 persen. Sementara APM SMP tercatat sebesar 74,92 persen. Pada jenjang SMA, APM-nya menurun menjadi 63,76 persen. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum APM penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan hampir pada semua jenjang pendidikan kecuali jenjang pendidikan SMP. Pada jenjang sekolah dasar, APM laki-laki tercatat sebesar 98,19 persen.

APM SD perempuan tercatat sebesar 95,18 persen. Pada jenjang SMP, APM perempuan tercatat sebesar 76,53 persen sementara APM laki-laki mencapai 73,30 persen. Kesenjangan APM melebar pada jenjang pendidikan SMA. Perbedaan APM laki-laki dan perempuan terpaut hingga 21 poin. APM laki-laki tercatat sebesar 73,32 persen, sementara APM perempuan hanya 52,51 persen.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan, salah satu indikator yang digunakan adalah rasio antara jumlah murid dengan guru. Semakin kecil nilai rasio ini, menandakan bahwa semakin memadainya pelayanan pendidikan dari sisi rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat merata atau tidaknya jumlah tenaga pengajar pada suatu daerah.

Tabel 3.5 Rasio Murid –Guru di Kota Denpasar, per Tahun Ajaran 2012-2015

Tahun Ajaran	Rasio Murid-Guru				
	TK	SD	SMP	SMA	SMK
2011/2012	12.77	22.75	9.97	48.79	35.03
2012/2013	13.21	25.34	9.84	12.04	11.59
2013/2014	10.91	21.40	9.76	12.54	11.23
2014/2015	7.84	21.09	13.02	16.45	16.04
2015/2016	7.53	20.73	18.67	14.01	11.22

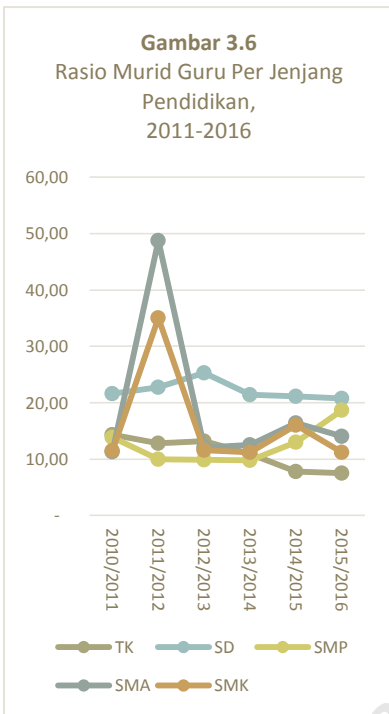
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar

Secara umum rasio murid guru per jenjang pendidikan cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Rasio murid-guru Taman Kanak-kanak (TK) misalnya, tetap dari 7

murid per guru. Rasio ini menggambarkan 1 orang guru secara rata-rata membimbing sekitar 7 orang murid. Demikian halnya rasio murid guru di tingkat SD atau sederajat pada tahun ajaran 2015/2016 tercatat sebesar 20,73 yang artinya seorang guru SD rata-rata mengajar sekitar 20 orang siswa. Rasio ini mengalami penurunan dari tahun ajaran 2011/2012 yang tercatat sebesar 22,75 murid per guru.

Sedikit berbeda untuk jenjang pendidikan SMP atau sederajat. Rasio murid gurunya mengalami peningkatan periode lima tahun terakhir, dari sebesar 9,97 pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi sebesar 18,67 pada tahun ajaran 2015/2016. Pada jenjang pendidikan SMA atau sederajat yang rasionya mengalami fluktuasi selama periode tahun ajaran 2011/2012 hingga 2015/2016. Rasio murid guru pada jenjang ini pada tahun ajaran 2011/2012 berada pada angka 48,79, paling tinggi untuk 1 orang guru mengajar siswa sebanyak 48 murid sedangkan pada tahun ajaran berikutnya mengalami penurunan menjadi 12,04. Memasuki tahun ajaran 2013/2014 rasio murid guru pada jenjang ini meningkat menjadi 16,45. Dan dua tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga pada tahun ajaran 2015/2016 rasio murid guru mencapai 14,01 murid per guru.

Demikian halnya untuk rasio murid guru pada jenjang pendidikan SMK. Rasio murid guru pada jenjang ini pada tahun ajaran 2011/2012 tercatat sebesar 35,03, yang kemudian pada tahun ajaran berikutnya mengalami penurunan hingga memasuki tahun ajaran 2013/2014 rasio murid guru pada jenjang ini meningkat menjadi 11,23. Tahun berikutnya meningkat pada tahun ajaran 2014/2015 turun menjadi 16,04. Kembali pada tahun ajaran 2015/2016 mengalami penurunan dengan rasio mencapai 11,22 murid per guru.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar

4. KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini masih menggunakan data tahun 2015. Hal ini disebabkan karena data ketenagakerjaan tahun 2016 tidak tersedia.

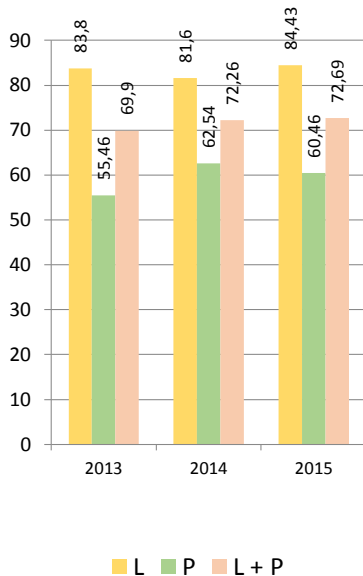
Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013-2015

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
L	83,80	81,60	84,43	3,06	2,41	3,08
P	55,46	62,54	60,46	1,98	2,21	4,21
L + P	69,90	72,26	72,69	2,64	2,31	3,54

Sumber : Sakernas 2013-2015

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Denpasar selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2013 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,90 persen. Ini menggambarkan bahwa sebanyak 69,90 persen dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi, sedangkan sisanya tergolong bukan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah,

Gambar 4.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Denpasar, Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2015



Sumber : Sakernas 2013-2015

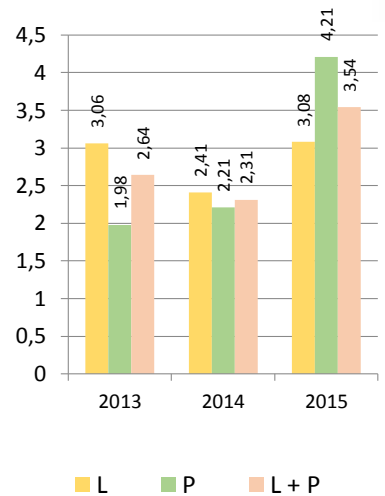
mengurus rumah tangga atau lainnya. Memasuki tahun 2014, TPAC meningkat menjadi sebesar 72,26 persen, lalu pada tahun 2015 TPAC tercatat kembali meningkat dengan TPAC mencapai 72.69 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, selama periode tahun 2013 hingga tahun 2015, TPAC laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAC perempuan. TPAC laki-laki selama tiga tahun terakhir selalu berada pada di atas 80 persen, sementara TPAC penduduk perempuan, berada jauh di bawahnya, pada kisaran 55-62 persen. Lebih rendahnya TPAC perempuan dibanding laki-laki dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan akan mengurus rumah tangga. Namun demikian, selama tiga tahun terakhir, TPAC perempuan cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2015 TPAC perempuan tercatat mencapai 60,46 persen.

TPAC menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun untuk melihat seberapa banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan usaha yang tersedia, dapat dilihat melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Denpasar terbilang rendah. Selama 3 tahun terakhir (2013-2015) tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar tercatat berada di bawah kisaran 3 persen. TPT mengalami penurunan dari sebesar 2,64 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,31 persen pada tahun 2014, namun kembali meningkat pada tahun 2015 dengan TPT sebesar 3,54. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT penduduk perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk laki-laki. TPT perempuan selama kurun waktu

tiga tahun terakhir berada di atas 4 persen, sedangkan TPT penduduk laki-laki berkisar antara 2-3 persen.

Gambar 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Denpasar, Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2015



Sumber : Sakernas 2013-2015

<https://denpasarkota.bps.go.id>

5. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Perumahan diartikan sebagai sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal. Adapun rumah sendiri dapat diartikan sebagai salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Rumah atau yang dikenal istilahnya dengan papan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan.

Dewasa ini, rumah menjadi salah satu jati diri pemiliknya. Tak hanya menjadi tempat tinggal sesuai fungsinya, rumah dijadikan sebagai *lifestyle*. Bali sendiri merupakan daerah dengan harga rumah/*property* yang cukup tinggi. Mengingat wilayah Bali cukup kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi khususnya di Kota Denpasar.

Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat, yaitu: pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain *privacy* yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan

penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran. Keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah.

Definisi rumah sehat lainnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 162 dan 163 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal 163 ayat 2 mengamanatkan bahwa lingkungan sehat antara lain mencakup lingkungan permukiman. salah satu upaya mewujudkan lingkungan sehat adalah dengan peningkatan rumah sehat. Rumah sehat sendiri adalah rumah yang memenuhi kriteria minimal : akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan (Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/PER/V/ MENKES/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah).

Selain sehat, sebuah rumah juga harus layak huni. Salah satu konsep rumah layak huni yang digunakan adalah konsep dari Kementerian Perumahan Rakyat. Variabel dilihat adalah kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah. (Nomor: 22/ Permen/ M/ 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota). Dalam publikasi ini akan dibahas mengenai

karakteristik rumah berdasarkan kualitasnya, fasilitas dan status kepemilikannya.

Kualitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal yang baik akan membuat penghuninya merasa aman, terlindung dan terjamin kesehatannya. Ada beberapa indikator yang menunjukkan kualitas rumah tinggal yakni rumah dengan lantai bukan tanah, rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes, serta dinding terbuat dari tembok atau kayu.

Salah satu indikator yang menentukan kualitas rumah yang baik adalah dilihat dari lantainya. BPS sendiri mengklasifikasikan lantai menjadi beberapa kategori antara lain lantai marmer, keramik, parket/vinil/permadani, ubin/tegel/teraso, kayu/papan kualitas tinggi, semen/bata merah, bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah.

Tabel 5.1 Rumah Tangga Menurut Indikator Lantai Terluas (%), Tahun 2015-2016

Jenis Lantai (%)	2015	2016
Marmer/ Granit	1.53	1.78
Keramik	80.42	81.44
Parquet/ Vinil/ Permadani	0.12	0.00
Ubin/ Tegel/ Teraso	4.49	3.61
Kayu/Papan Kualitas Tinggi	0.00	0.14
Semen/ Bata Merah	13.09	12.80
Bambu, Kayu/Papan Kualitas Rendah	0.00	0.00
Tanah	0.36	0.23
Lainnya	-	-
Jumlah	100.00	100.00

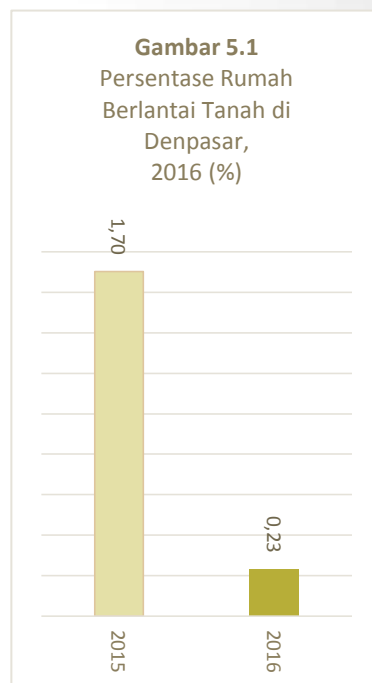
Sumber: Susenas 2015-2016

Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan lantai tanah tercatat hanya sekitar 0,23 persen. Lebih rendah dibanding kondisi tahun sebelumnya di mana persentase rumah berlantai tanah mencapai 0,36 persen. Dari gambar ini kiranya dapat dikatakan kualitas perumahan dari sisi lantai yang digunakan sudah semakin baik.

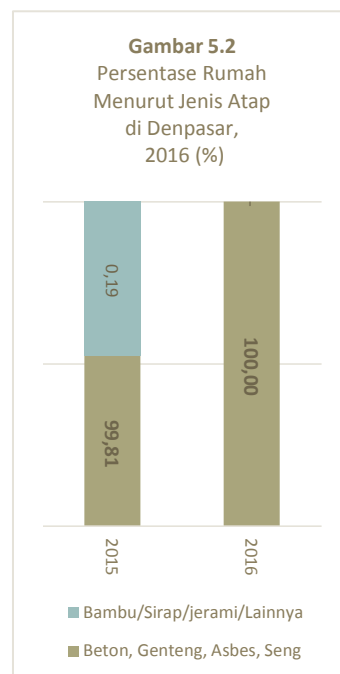
Selain lantai, atap rumah pun mempengaruhi kualitas rumah. Atap yang baik memiliki klasifikasi atap yang mampu melindungi rumah dari perubahan cuaca baik panas, hujan, petir, angin, debu, dan sebagainya. Atap yang layak adalah atap yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng dan asbes.

Dilihat dari sisi atap yang digunakan, kondisi perumahan di Kota Denpasar bisa dikatakan memenuhi standar. Pada tahun 2016 semua (100 persen) rumah di Kota Denpasar sudah menggunakan atap yang dianggap layak yakni terbuat beton, genteng, sirap, seng dan asbes. Kondisi ini membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, pada tahun 2015 kondisi rumah menurut jenis atap yang dianggap layak sebesar 99,81 persen. Sedangkan 0,19 persen merupakan jenis atap yang masih menggunakan atap lainnya.

Melihat kondisi tersebut, menggambarkan ada rumah tangga yang masih tinggal di rumah dengan jenis atap lainnya pada tahun 2015. Untuk kondisi wilayah perkotaan pada tahun 2016 sudah tidak ditemukan rumah dengan jenis atap tidak layak.



Sumber : Susenas 2015-2016

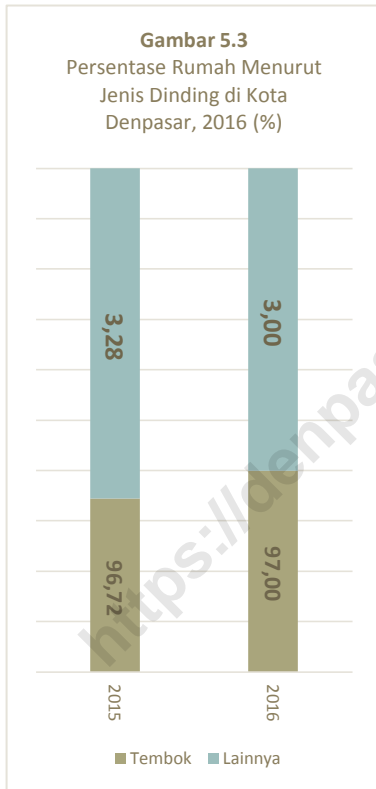


Sumber : Susenas 2015-2016

Tabel 5.2. Rumah Tangga Menurut Indikator Atap Terluas, Tahun 2015-2016 (%)

Jenis Atap Terluas (%)	2015	2016
Beton	2.29	1.80
Genteng	70.35	71.59
Asbes	24.56	23.76
Seng	2.61	2.85
Bambu/ Kayu/ Sirap	0.00	0.00
Jerami/ Ijuk/ Daun/ Rumbia	0.00	0.00
Lainnya	0.19	0.00
Jumlah	100.00	100.00

Sumber: Susenas 2015-2016



Sumber : Susenas 2015-2016

Dinding rumah merupakan salah satu elemen yang penting pada suatu bangunan rumah. Dinding yang kokoh dapat melindungi penghuninya dari ancaman gempa maupun penyakit. Pada tahun 2016, persentase rumah tangga di Kota Denpasar yang menggunakan dinding tembok pada rumahnya adalah sebesar 97 persen. Sisanya 3 persen masih berdindingkan plesteran kawat/anyaman bambu, kayu, anyaman bambu dan batangan kayu. Kondisi ini lebih baik dibanding tahun 2015, di mana persentase rumah tangga yang rumahnya berdinding tembok tercatat sebesar 96,72 persen.

Tabel 5.3. Rumah Tangga Menurut Indikator Dinding Terluas (%), Tahun 2015-2016

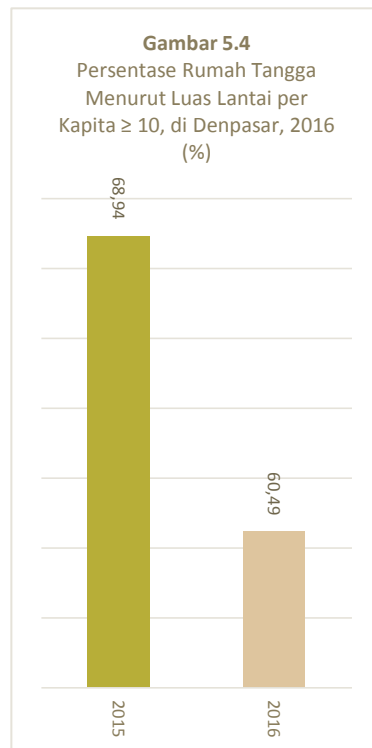
JenisTembok (%)	2015	2016
Tembok	96.40	97.18
Plesteran Anyaman Bambu/Kawat	0.21	0.48
Kayu	0.83	0.86
Anyaman Bambu	1.74	1.24
Batang Kayu	0.14	0.03
Bambu	0.30	0.17
Lainnya	0.38	0.04
Jumlah	100.00	100.00

Sumber : Susenas 2015-2016

Kualitas rumah juga diukur dari rata-rata luas lantai per kapita. Luas lantai per kapita sendiri dapat diartikan sebagai luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Luas lantai bangunan rumah sehat kiranya menyediakan ruang yang nyaman dan cukup untuk penghuni di dalamnya artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Dari sisi luas lantai per kapita, sebagian besar rumah tangga memiliki luas lantai per kapita di atas 10 M², artinya setiap anggota rumah tangga mempunyai ruang lebih dari 10 M² secara rata-rata. Namun demikian dari sisi persentase mengalami penurunan dibanding tahun 2015 lalu. Persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita pada tahun 2015 mencapai 79,07 persen. Pada tahun 2016 persentasenya tercatat turun, menjadi hanya 75,98 persen.

Pada sisi lainnya persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 M² meningkat dari 20,54 persen pada tahun 2015 menjadi 26,10 persen pada tahun 2016. Persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita antara 7,3 – 9,9 M² meningkat dari 10,51 persen menjadi 13,41 persen pada tahun 2016.



Sumber : Susenas 2015-2016

Tabel 5.4. Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita (%), Tahun 2015 – 2016

Luas Lantai Per Kapita M ²	2015	2016
≤ 7,2	20.54	26.10
7,3 - 9,9	10.51	13.41
≥ 10	68.94	60.49
Jumlah	100.00	100.00

Sumber : Susenas 2015-2016

Jika dilihat per wilayah, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 M², tertinggi tercatat di Kota Denpasar dengan persentase mencapai 26,10 persen. Hal ini kiranya disebabkan oleh hunian yang harganya relatif tinggi di perkotaan sehingga sebagian besar hanya mampu membeli rumah yang tidak terlalu besar ataupun hanya mengontrak kamar sesuai dengan kemampuan ekonominya.

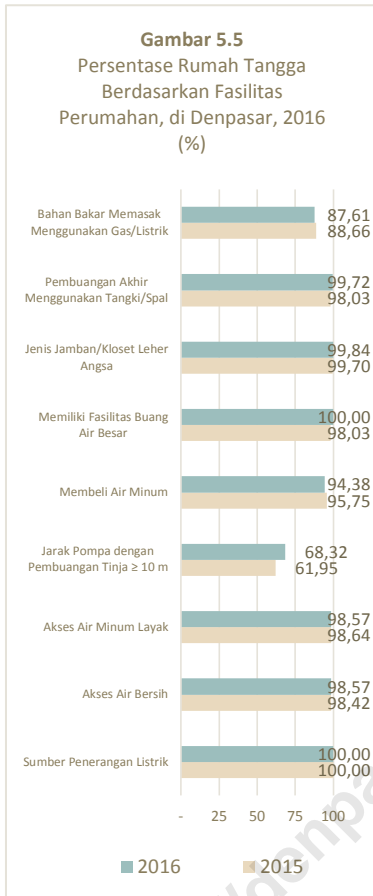
Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kondisi rumah (atap, lantai, dinding), fasilitas rumah tinggal yang baik sudah tentu akan menambah kenyamanan dan kemudahan dalam beraktifitas serta meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Fasilitas rumah tangga antara lain terkait dengan ketersediaan air bersih untuk minum, ketersediaan jamban dan listrik untuk penerangan rumah tangga.

Indikator pertama yang digunakan untuk melihat fasilitas rumah tinggal yang baik adalah akses rumah tangga terhadap sumber air minum. Air minum bersih didefinisikan sebagai air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangi septik) > 10 m.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum bersih di tahun 2016 adalah sebesar 98,57 persen. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 98,57 pada tahun 2016 turun dibanding 2015 yang tercatat sebesar 98,64 persen.

Jarak sumber air (pompa) dengan pembuangan tinja idealnya di atas 10 m. Namun hal ini kiranya akan sulit



Sumber : Susenas 2015-2016

dipenuhi mengingat kondisi perumahan sekarang semakin sempit dan berdekatan. Hal ini setidaknya tergambar dari persentase rumah tangga dengan jarak lebih dari 10 meter dari pembuangan tinja yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria ini mencapai 61,95 persen. Sementara pada tahun 2016 persentasenya tercatat hanya sebesar 68,32 persen. Dari sisi cara perolehan air minum, sebagian besar rumah tangga memperoleh air minum dengan cara membeli. Persentasenya sekitar 94 persen. Pada satu sisi ini berarti kualitas air minum bertambah baik dengan asumsi kualitas air minum yang diperdagangkan lebih baik. Pada kondisi tertentu ini menunjukkan keterbatasan akses bagi penduduk dengan pendapatan rendah.

Indikator selanjutnya yang bermanfaat untuk mengukur kelayakan sanitasi adalah kepemilikan jamban. Persentase rumah tangga di Kota Denpasar yang sudah memiliki jamban sendiri pada tahun 2016 sebesar 100 persen, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2015 di mana persentasenya sebesar 98,03 persen. Jamban yang memenuhi syarat kesehatan merupakan jamban yang pembuangan terakhirnya menggunakan tangki septik/ leher angsa. Penggunaan jamban jenis leher angsa juga relatif tinggi. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban jenis ini mencapai 99 persen pada tahun 2016. Demikian halnya persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik pada tahun 2016 telah mencapai hampir 99 persen dan angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Fasilitas rumah lainnya adalah ada atau tidaknya sumber penerangan di rumah tangga. Secara umum, hampir semua rumah tangga di Kota Denpasar menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang sudah teraliri listrik mencapai 100 persen.

Jenis bahan bakar yang paling sering digunakan untuk memasak kiranya dapat menjadi indikator kualitas dari fasilitas perumahan. Apalagi belakangan program alih energi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas gencar dilakukan. Bahan bakar gas dinilai lebih rendah polusi dan lebih hemat energi. Dari sisi penggunaan bahan bakar ini, sebagian besar rumah tangga di Kota Denpasar sudah menggunakan bahan bakar gas/listrik untuk keperluan memasak. Persentasenya pun mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga yang menggunakan gas/listrik tercatat sebesar 88,66 persen, meningkat menjadi 87,61 persen pada tahun 2016.

Tabel 5.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2015 – 2016

Fasilitas Perumahan	2015	2016
Sumber Penerangan Listrik	100.00	100.00
Akses Air Bersih	98.42	98.57
Akses Air Minum Layak	98.64	95.57
Jarak Pompa dengan Pembuangan Tinja \geq 10 m	61.95	68.32
Membeli Air Minum	95.75	94.38
Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	98.03	100.00
Jenis Jamban/Kloset Leher Angsa	99.70	99.84
Pembuangan Akhir Menggunakan Tangki/Spal	98.03	99.72
Bahan Bakar Memasak Menggunakan Gas/Listrik	88.66	87.61

Sumber : Susenas 2015-2016

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati karena dengan indikator ini dapat diperoleh gambaran tentang kemampuan penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu tersedianya rumah layak huni.

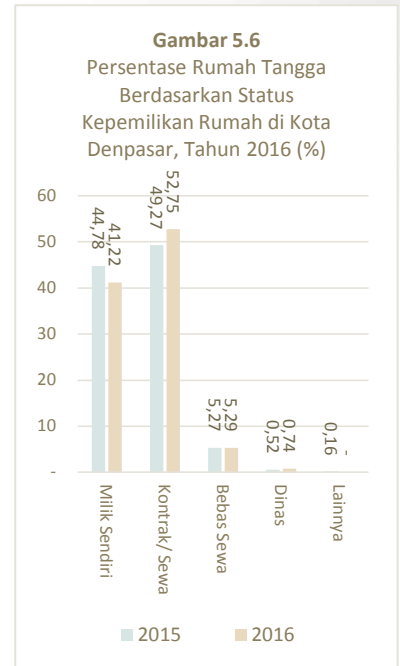
Pada tahun 2016, proporsi rumah tangga dengan status rumah milik sendiri di Kota Denpasar sebesar 41,22 persen. Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri menurun dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 44,78 persen. Pada tahun 2016, rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa mencapai 52,75 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 49,27 persen.

Penurunan persentase kepemilikan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Mahalnya harga rumah bisa menjadi salah satu faktornya. Hal ini jelas terlihat jika membandingkan persentase kepemilikan rumah di wilayah perkotaan dan bukan wilayah perkotaan. Daerah perkotaan umumnya menjadi tujuan migran dan harga properti di wilayah perkotaan relatif lebih tinggi. Pada kondisi ini tentu menyewa rumah menjadi opsi bagi sebagian penduduk perkotaan.

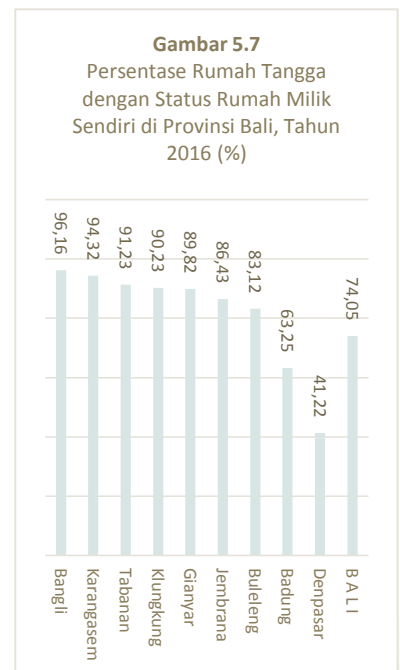
Tabel 5.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Denpasar, Tahun 2015-2016

Status Kepemilikan (%)	2015	2016
Milik Sendiri	44.78	41.22
Kontrak/ Sewa	49.27	52.75
Bebas Sewa	5.27	5.29
Dinas	0.52	0.74
Lainnya	0.52	0.00
Jumlah	100.00	100.00

Sumber : Susenas 2015-2016



Sumber : Susenas 2015-2016



Sumber : Susenas, Provinsi Bali

6. KEMISKINAN

Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah bersangkutan. Namun kadang-kadang pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan tetap menyisakan kemiskinan bagi sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor – faktor produksi yang tersedia maupun hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu proses pembangunan ekonomi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang terjadi, beberapa metode yang biasa digunakan adalah metode *Head Count Index*. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, maka terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinannya.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya).

Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kilo kalori per hari (Hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978).

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut Garis Kemiskinan. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan dan jika pengeluarannya di bawah garis tersebut, maka yang bersangkutan akan dikategorikan miskin.

Selain itu, secara umum kemiskinan juga dibedakan menjadi dua berdasarkan klasifikasi desa/kota (*Municipality*). Yang menjadikan pembeda tentunya garis kemiskinan antara kota dan desa yang berbeda. Perbedaan ini tentunya didasari asumsi bahwa tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa.

Tabel 6.1 Garis Kemiskinan Di Provinsi Bali Menurut Kategori Kota dan Desa, Tahun 2011 – 2016

Tahun	Makanan			Non Makanan			Jumlah		
	Kota	Desa	K + D	Kota	Desa	K + D	Kota	Desa	K + D
Mar 2011	172 554	150 591	163 800	75 877	59 556	69 372	248 431	210 147	233 172
Sept 2011	177 298	154 921	168 384	78 698	62 284	72 159	255 431	217 205	240 543
Mar 2012	184 288	161 350	175 120	81 520	64 897	74 876	265 808	226 247	249 997
Sept 2012	186 391	163 244	177 163	83 629	67 145	77 058	270 020	230 389	254 221
Mar 2013	199 083	177 921	190 640	88 468	71 525	81 709	287 551	249 446	272 349
Sept 2013	206 993	183 951	197 960	91 456	77 662	86 049	298 449	261 613	284 009
Mar 2014	213 970	192 233	205 477	96 351	79 413	89 733	310 321	271 646	295 210
Sept 2014	216 079	196 981	208 620	100 156	82 159	93 127	316 235	279 140	301 747
Mar 2015	226 679	214 350	221 931	106 320	89 655	99 903	332 999	304 005	321 834
Sept 2015	231 680	222 166	228 017	109 874	92 052	103 011	341 554	314 218	331 028
Mar 2016	237 835	230 108	234 393	110 736	92 552	104 574	348 571	322 660	338 967
Sep 2016	242 429	233 243	238 822	114 998	94 790	107 576	357 427	328 033	346 398

Sumber: SUSENAS, BPS Provinsi Bali

Berdasarkan hasil pendataan Susenas, Garis Kemiskinan (GK) pada Tahun 2016 (Bulan Maret) untuk Provinsi Bali mencapai Rp. 338.967,-. Jika dibedakan berdasarkan wilayah, GK perkotaan di Provinsi Bali sebesar Rp. 338.967,- sedikit lebih tinggi dari GK perdesaan yang hanya mencapai Rp. 322.660,-.

Kemiskinan Kabupaten/Kota

Dilihat persebarannya menurut kabupaten/kota, persentase tertinggi penduduk miskin di Provinsi Bali pada Tahun 2016, terdapat di Kabupaten Karangasem yang mencapai 6,61 persen, diikuti oleh Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng dengan persentase masing-masing

sebesar 6,35 persen dan 5,79 persen. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Badung dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,06 persen, disusul oleh Kota Denpasar sebesar 2,15 persen dan Kabupaten Gianyar sebesar 4,44 persen. Kabupaten lainnya, tingkat kemiskinannya berada pada kisaran 5-6 persen.

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase dan Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Maret 2015 dan 2016

Kab/Kota	Jml Penduduk Miskin (Dlm 000)		Persentase Penduduk Miskin (PO %)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Maret 2015	Maret 2016	Maret 2015	Maret 2016	Maret 2015	Maret 2016
Jembrana	15,83	14,53	5,84	5,33	330.073	354.901
Tabanan	24,05	21,90	5,52	5,00	365.022	392.479
Badung	14,40	12,91	2,33	2,06	454.916	470.732
Gianyar	22,89	22,13	4,61	4,44	320.805	339.414
Klungkung	12,11	11,21	6,91	6,35	264.866	284.789
Bangli	12,74	11,66	5,73	5,22	283.849	305.200
Karangasem	30,33	27,12	7,44	6,61	269.866	288.436
Buleleng	43,43	37,55	6,74	5,79	327.357	350.902
Denpasar	20,94	19,17	2,39	2,15	463.271	483.821

Sumber: SUSENAS, BPS Provinsi Bali

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota di Bali pada Tahun 2016. Buleleng adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi selama 2015 – 2016. Dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng turun sekitar 5,88 ribu jiwa.

Secara persentase, Kabupaten Buleleng kembali merupakan kabupaten dengan persentase penurunan penduduk miskin yang tertinggi selama kurun waktu 2015-

2016. Terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng sekitar -0,95 persen.

Garis kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, rata-rata meningkat pada kisaran 5 – 7 persen. Hanya 2 daerah yang mengalami peningkatan GK di bawah 5 persen, yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. GK di Kota Denpasar pada Tahun 2016 mencapai Rp, 483,821,- sedangkan di Kabupaten Badung mencapai Rp, 470,732,-.

<https://denpasarkota.bps.go.id>

7. SOSIAL LAINNYA

Intensitas Penduduk untuk Bepergian

Salah satu aktivitas penduduk yang dicatat dalam Susenas adalah aktivitas bepergian. Yang dimaksud dengan bepergian dalam konsep Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela, dengan waktu kurang dari 6 bulan baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) serta bukan bertujuan untuk sekolah atau bekerja secara rutin.

Tabel 7.1. Persentase Penduduk yang Bepergian dalam Enam Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2015 – 2016

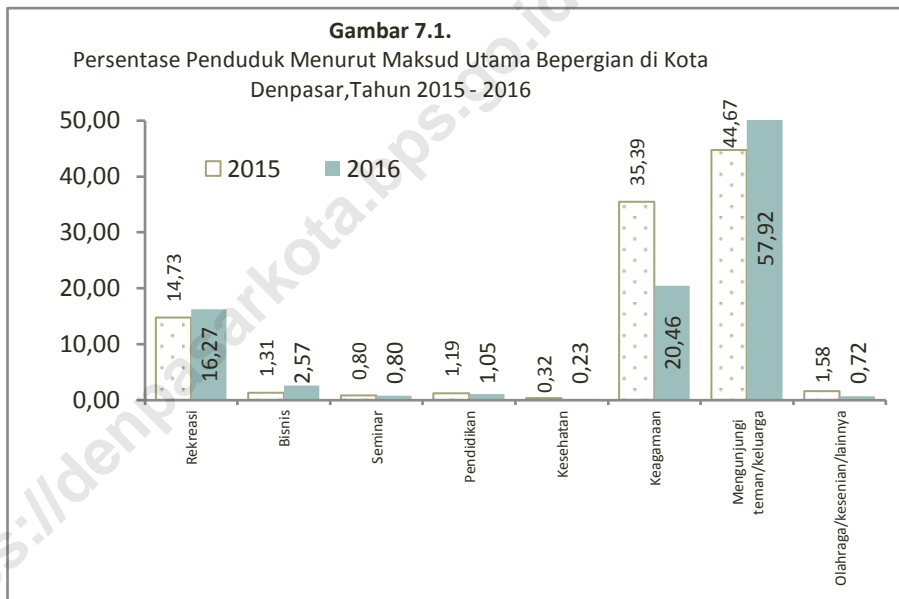
Jenis Kelamin	Tahun	
	2015	2016
Laki-laki	39,56	35,96
Perempuan	38,27	35,51

Sumber: Susenas 2015-2016

Berdasarkan Tabel 7.1, tercatat bahwa terjadi peningkatan intensitas penduduk Kota Denpasar dalam melakukan bepergian pada Tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2015, hanya 38,93 persen penduduk yang bepergian sedangkan pada Tahun 2016 mencapai 35,74 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, intensitas penduduk laki-laki dalam bepergian lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Pada Tahun 2016,

sekitar 35,96 penduduk laki-laki bepergian, sedangkan pada periode yang sama penduduk perempuan yang bepergian hanya 35,51 persen.

Maksud utama penduduk yang melakukan bepergian cukup beragam, mulai dari untuk berlibur/rekreasi, kepentingan profesi, untuk mengikuti misi/pertemuan/seminar, terkait dengan pendidikan/pelatihan, untuk kesehatan/berobat, kepentingan berziarah/keagamaan, untuk mengunjungi teman/keluarga atau untuk kegiatan olahraga/kesenian/lainnya.



Sumber: Susenas 2015-2016

Berdasarkan gambar 7.1., ternyata maksud tujuan utama penduduk Kota Denpasar yang bepergian adalah dalam rangka kegiatan keagamaan, mengunjungi teman/keluarga serta untuk rekreasi/berlibur. Persentase penduduk dengan maksud utama bepergian yang lain seperti seminar dan pendidikan cukup kecil yaitu tidak mencapai 1 persen.

Persentase penduduk yang bepergian dengan maksud utama untuk mengunjungi teman/keluarga pada

Tahun 2016 mencapai 57,92 persen meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 44,67 persen. Peningkatan persentase juga terjadi pada penduduk dengan maksud bepergian untuk berlibur/rekreasi yaitu dari 16,27 persen pada Tahun 2015 menjadi 14,73 persen pada Tahun 2016. Sebaliknya, persentase penduduk yang bepergian untuk maksud keagamaan pada Tahun 2016 menurun menjadi 20,463 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 35,39 persen.

Banyaknya penduduk yang melakukan perjalanan wisata (berlibur/rekreasi) sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 7.1, dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, karena semakin sejahtera penduduk maka akan lebih banyak yang mampu memenuhi kebutuhan tersier seperti melakukan perjalanan wisata.

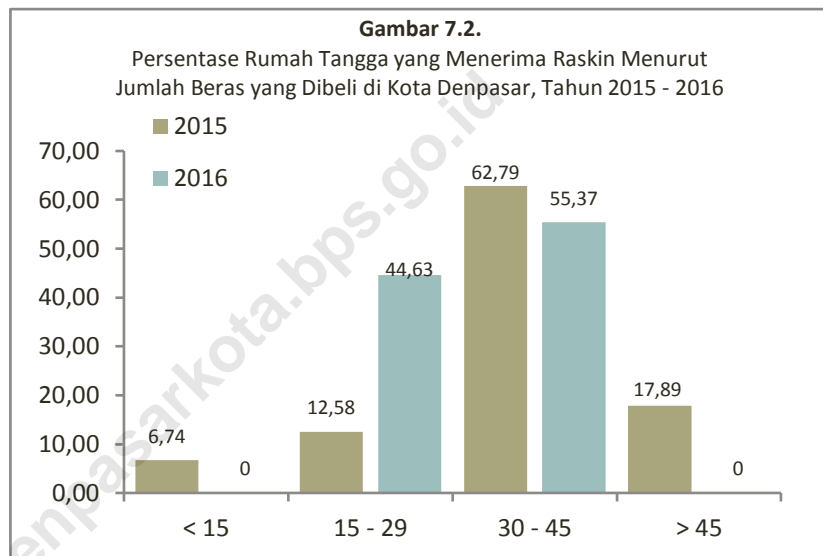
Wisata merupakan kebutuhan tersier masyarakat yang dapat menunjukkan level kesejahteraan seseorang. Pada umumnya, semakin sejahtera seseorang maka semakin tinggi peluang untuk memenuhi kebutuhan non primer. Wisata atau liburan seringkali dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengurangi kejenuhan rutinitas sehari-hari. Dewasa ini wisata pun menjadi tren gaya hidup seseorang.

Akses terhadap Bantuan Sosial

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui diluncurkannya berbagai program-program perlindungan sosial. Terdapat beberapa jenis program perlindungan sosial yang ditujukan untuk rumah tangga antara

lain bantuan raskin, kredit usaha serta bantuan siswa miskin (BSM).

Program raskin diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu pangan. Sehingga setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

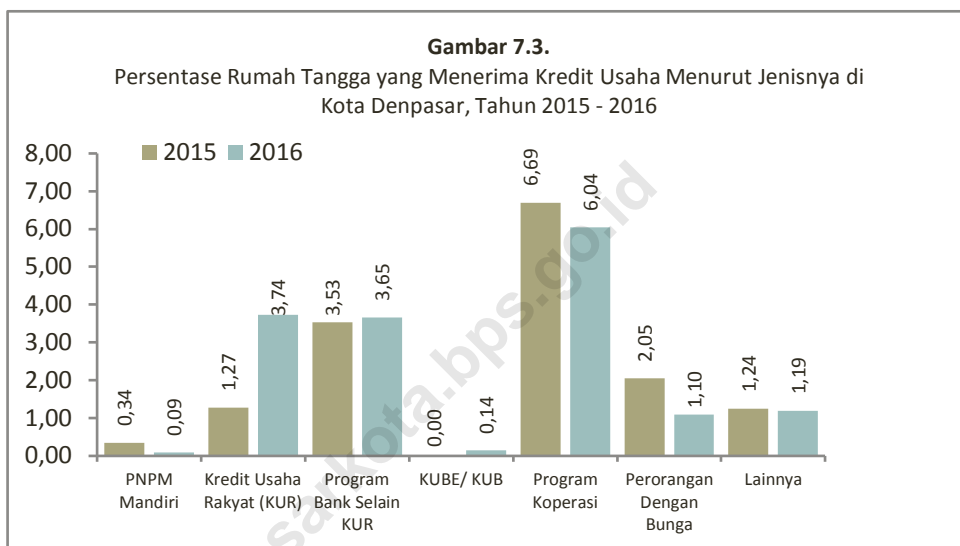


Sumber: Susenas 2015-2016

Rumah tangga yang menerima bantuan sosial raskin di Bali mengalami peningkatan pada Tahun 2016. Persentase rumah tangga yang menerima raskin mencapai 0,31 persen pada Tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,67 persen.

Berdasarkan gambar 7.2, dapat dilihat bagaimana rumah tangga penerima raskin pada Tahun 2015-2016 menurut jumlah beras yang dibeli. Persentase terbesar rumah tangga penerima raskin pada Tahun 2016 dalam jumlah pembelian beras raskin yaitu sebanyak 30-45 kg.

Selain raskin, kredit usaha juga diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya membantu permodalan masyarakat dalam melakukan usaha. Melalui program ini diharapkan dapat membantu usaha/industri rumah tangga untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya.



Sumber: Susenas 2015-2016

Salah satu program kredit usaha yang sedang digulirkan bagi masyarakat adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat), Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Dengan bunga ringan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membuka atau meningkatkan usahanya.

Sama halnya dengan raskin, persentase rumah tangga di Kota Denpasar yang menerima kredit usaha mengalami peningkatan pada Tahun 2016. Jika pada Tahun

2015 persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha hanya 12,84 persen, kemudian meningkat menjadi 14,63 persen pada Tahun 2016.

Alokasi kredit usaha ini menyebar merata di 4 (empat) Kecamatan di Kota Denpasar . Berdasarkan gambar 7.3, tercatat persentase rumah tangga dengan jenis kredit usaha terbesar pada Tahun 2016 adalah program koperasi yaitu sebesar 6,04 persen, kemudian diikuti oleh kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3,74 persen dan program bank selain KUR sebesar 3,65 persen.

Jenis program perlindungan sosial yang juga sangat bermanfaat bagi masyarakat adalah Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan utama dari diluncurkannya BSM adalah untuk memastikan anak-anak dari rumah tangga miskin tetap mampu bersekolah. Dengan bersekolah diharapkan meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupan keluarganya, sehingga keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

BSM ini diberikan dari tingkat pendidikan dasar sampai menengah, yaitu BSM SD, SMP sampai SMA. Berdasarkan tabel 8.2, dapat dilihat perkembangan rumah tangga yang menerima BSM pada Tahun 2015 – 2016.

Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga yang Menerima BSM di Kota Denpasar, Tahun 2015 – 2016

Tahun	Jenis Bantuan Siswa Miskin (BSM)		
	BSM SD sederajat	BSM SMP sederajat	BSM SMA sederajat
2015	0,86	0,27	0,50
2016	0,45	0,18	0,12

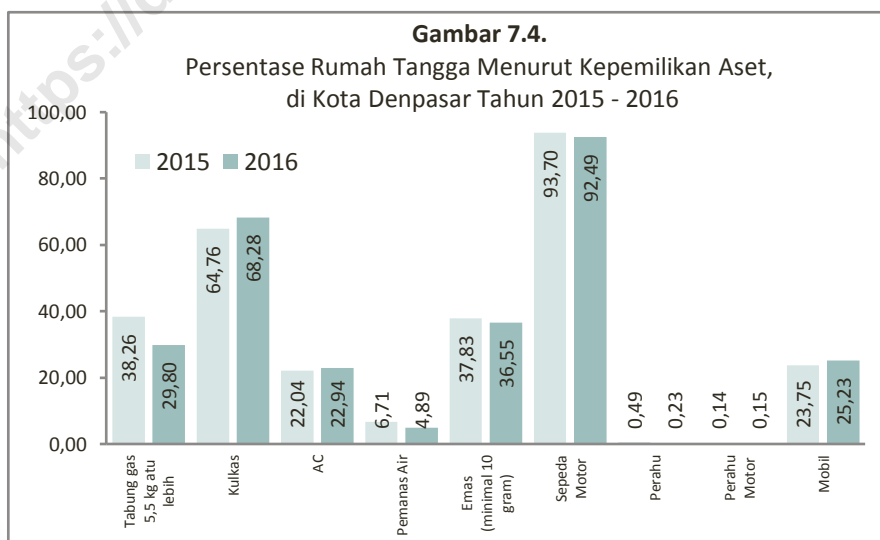
Sumber: Susenas 2015-2016

Persentase rumah tangga yang menerima BSM di tingkat SMP dan SMA mengalami penurunan pada Tahun 2016. Jika pada Tahun 2015 jumlah penerima BSM SMP dan SMA masing-masing sebesar 0,27 persen dan 0,50 persen, persentase tersebut meningkat pada Tahun 2016 menjadi 0,18 persen dan 0,12 persen. Penerima BSM SD mengalami sedikit penurunan dari 0,86 persen pada Tahun 2015 menjadi 0,45 persen pada Tahun 2016.

Kepemilikan Aset

Indikator lainnya yang juga dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah kepemilikan aset. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, pada umumnya akan sejalan dengan ragam aset yang dimiliki.

Dalam pengumpulan data Susenas, masyarakat ditanyakan terkait kepemilikan 9 jenis aset yaitu tabung gas 5,5 kg atau lebih, lemari es/kulkas, AC, pemanas air, emas/perhiasan (minimal 10 gram), sepeda motor, perahu, perahu motor serta mobil.



Sumber: Susenas 2015-2016

Berdasarkan gambar 7.4., hampir 93 persen rumah tangga di Kota Denpasar memiliki sepeda motor. Pada Tahun 2016, sekitar 92,49 persen rumah tangga memiliki sepeda motor. Hal ini sangat wajar, karena sepeda motor merupakan sarana transportasi utama di Kota Denpasar. Sama halnya dengan sepeda motor, kepemilikan mobil juga meningkat pada Tahun 2016. Jika pada Tahun 2016, persentase rumah tangga yang memiliki mobil mencapai 25,23 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 23,75 persen.

Kulkas juga menjadi salah satu aset yang tinggi persentasenya di Kota Denpasar. Sekitar 68,28 persen rumah tangga di Kota Denpasar sudah memiliki kulkas. Jenis aset lainnya yang juga tinggi persentasenya adalah emas/perhiasan dengan berat minimal 10 gram serta tabung gas 5,5 kg atau lebih.

Korban Tindak Kejahatan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat keamanan di suatu wilayah. Semakin sejahtera suatu wilayah, maka diasumsikan akan semakin rendah tindak kejahatan yang terjadi.

Selama tahun 2016, persentase penduduk Kota Denpasar yang pernah menjadi korban kejahatan adalah sebesar 1,06 persen. Persentase ini menurun dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 1,43 persen.

Tabel 7.3 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kota Denpasar, Tahun 2015 – 2016

Tahun	Penduduk menjadi Korban Kejahatan (%)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
2015	1,79	1,04	1,43
2016	1,50	0,61	1,06

Sumber: Susenas 2015-2016

Dibandingkan menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang menjadi korban kejahatan dibandingkan penduduk perempuan. Pada Tahun 2016, sekitar 1,50 persen penduduk laki-laki menjadi korban kejahatan sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,79 persen. Sedangkan penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan hanya 0,61 persen. Persentase perempuan yang menjadi korban kejahatan pada Tahun 2016 ini meningkat dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 1,04 persen.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Jl. Mulawarman, No. 11, Denpasar 81111

Telp. (0361) 418770, Fax. (0361) 434326

Homepage: <http://denpasarkota.bps.go.id>

Email: bps5171@bps.go.id



9 7 8 6 0 2 6 3 9 5 1 4 6